SENIN, 9 NOVEMBER 2026

Inspirasi dan Semangat Baru Banten

Rakyat Merdeka Group

BANTEN POS



Setiap 10 November, pemerintah dan masyarakat memperingati Hari Pahlawan melalui upacara, tabur bunga, serta ziarah ke makam para pejuang kemerdekaan. Namun, di balik seremoni tahunan tersebut, masih terdapat persoalan mendasar yang belum sepenuhnya diselesaikan pemerintah daerah, yakni perhatian terhadap veteran, keluarga pejuang, dan para tokoh perjuangan yang jejak pengorbanannya belum banyak dikenal.

BACA LENGKAP HAL-06

PAHLAWAN DIPUJA, PEJUANG TERLUPAKAN

SEJARAH PERJUANGAN BANTEN TERANCAM HILANG

06

MAKAM PAHLAWAN RUSAK, ANGGARAN PEMELIHARAAN TERBATAS

07









FOTO:DZIKI OKTOMAULIYADI/DEDE S/BANTEN POS

LAPORAN UTAMA

PUSAT BERBURU PAJAK, UMKM TERDAMPAK, PEMDA KENA IMBAS?

KONSOLIDASI GERAKAN RAKYAT 03

POKIR DAN PENGADAAN CILEGON JADI SOROTAN KPK 04

TAMBANG EMAS CIKOTOK RESAHKAN MURID DAN GURU SD 05

DEBUS ORA TEMBUS 10

KABUPATEN TANGERANG GENJOT OPLAH NON RAWA 11

TERVERIFIKASI DEWAN PERS

BANPOS CHANNEL | WWW.BANPOS.CO | BANTENPOS@GMAIL.COM | BANTEN_POS | BANTEN POS

HARGA ECERAN RP 4.000

Masjid Al-Hidayah Rawan Pencurian

TANGERANG – Masjid Al-Hidayah di Jalan Al-Hidayah, RT 03/RW 03, Kelurahan Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, kembali menjadi sasaran pencurian. Kali ini, pelaku yang diduga datang menggunakan mobil membobol pintu masjid dan membawa kabur telepon seluler milik marbot, Sadam Husen, Sabtu (7/11/2026) dini hari.

Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 03.21 WIB itu berlangsung saat Sadam tertidur di sekretariat masjid. Pelaku diduga memanfaatkan kondisi lingkungan yang sepi untuk masuk ke dalam bangunan dan mengambil telepon seluler yang berada tidak jauh dari tempat korban beristirahat.

Sebelum kejadian, sebuah mobil terlihat beberapa kali melintas di sekitar masjid. Gerak-gerik kendaraan tersebut sempat menarik perhatian warga karena berulang kali melewati lokasi. Sadam mengaku baru mendapat informasi mengenai mobil mencurigakan itu ketika dirinya masih tertidur. Namun, ia tidak menyadari kedatangan pelaku hingga telepon selulernya hilang. "Sekitar pukul 03.00 saya ketiduran. Begitu di jam 03.30, memang saya dapat kabar dari orang sekitar, ada mobil mencurigakan. Sudah beberapa kali mobil itu bolak-balik ke sinilah," kata Sadam saat ditemui SatelitNews.com, Minggu (8/11).

Rekaman kamera pengawas (CCTV) memperlihatkan kendaraan bernomor polisi B 1367 SPE yang diduga digunakan pelaku. Mobil tersebut awalnya berhenti dengan posisi menghadap bagian depan masjid, sebelum kemudian dimundurkan dan diparkir menghadap ke belakang. Seseorang kemudian turun dari kendaraan untuk memeriksa keadaan sekitar. Pelaku sempat mencoba masuk melalui pintu belakang, tetapi gagal karena terkunci. Ia lalu berpindah ke bagian depan dan diduga merusak pintu untuk mendapatkan akses masuk.

ARI SUJATMIKO/SATELIT NEWS.COM



Sadam Husen, korban pencurian menceritakan kronologis kejadian kepada awak media.

Setelah berhasil masuk, pelaku mengambil telepon seluler milik Sadam. Ironisnya, saat aksi berlangsung, korban berada di dalam bangunan yang sama, tetapi tidak mengetahui keberadaan pelaku karena sedang tertidur. "Dia di belakang pintunya dikunci, akhirnya dia lewat depan, maksa. Dia ngebobol pintu depan, akhirnya dia masuk ke dalam, terus ngambil HP. Di dalam enggak ada orang, cuma ada saya, saya lagi tidur," ujarnya.

Pencurian tersebut bukan kejadian pertama di Masjid Al-Hidayah. Sadam mengungkapkan, selama bertugas sebagai marbot, dirinya sudah empat kali kehilangan barang pribadi. Barang yang pernah dicuri antara lain laptop dan telepon seluler, termasuk dua perangkat berupa iPhone dan Android yang hilang dalam salah satu kejadian.

Selain barang milik marbot, kotak amal masjid juga berulang kali menjadi sasaran pencurian. Bahkan, menurut Sadam, pelaku terkadang membawa kotak amal sekaligus setelah mengambil uang di dalamnya. "Iya, dibobol, terus diangkut sama kotak-kotaknya gitu. Itu udah bukan pertama kali nih, gitu, udah sering banget," katanya.

Berulangnya pencurian tersebut membuat keamanan masjid menjadi perhatian, terlebih bangunan saat ini masih dalam proses renovasi. Sadam mengatakan, pada kejadian-kejadian sebelumnya, pengurus belum memiliki kamera pengawas sehingga sulit mengidentifikasi cara pelaku menjalankan aksinya. CCTV baru dipasang belakangan ini. Rekaman kamera pengawas tersebut kini menjadi salah satu petunjuk untuk menelusuri pencurian terbaru.

Meski demikian, Sadam mengaku tidak mengenali orang yang terlihat dalam rekaman. Ia juga menduga mobil yang digunakan pelaku tidak hanya ditumpangi satu orang. Namun, dugaan mengenai keterlibatan orang lain maupun kemungkinan adanya pihak yang mengetahui kondisi masjid masih perlu dibuktikan melalui penyelidikan. "Kalau secara dilihat dari CCTV ya, orangnya itu memang enggak dikenal. Cuman yang menjadi khawatirnya tuh orang yang ada di dalam mobilnya mungkin yang kenal sehingga dia ngasih tahu kondisi lapangan atau kondisi di masjid itu seperti apa," tuturnya.

Dalam pencurian terbaru, telepon seluler yang dibawa pelaku merupakan perangkat yang baru dibeli Sadam sekitar tiga bulan lalu dengan harga sekitar Rp9 juta. Nilai tersebut menambah kerugian dari sejumlah kejadian sebelumnya, termasuk kehilangan laptop yang diperkirakan bernilai Rp18 juta serta dua telepon seluler lainnya.

Sadam berencana melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian pada Minggu (8/11/2026). Ia mengaku belum sempat membuat laporan sehari setelah pencurian karena masih berupaya mencari telepon selulernya yang hilang. Perangkat tersebut selama ini digunakan untuk menunjang pekerjaan sehari-hari. "Hari ini saya mau lapor ke Kepolisian. Baru hari ini saya mau ngelapor, karena kemarin saya sibuk nyari HP dululah karena kan kerjaan saya ada di situ. Jadi baru kali ini," ucapnya.

Sadam berharap rekaman CCTV dapat membantu kepolisian mengidentifikasi pelaku maupun kendaraan yang digunakan. Ia juga berharap pengamanan masjid ditingkatkan agar pencurian serupa tidak kembali terjadi. (ARI/PAY)

RUANG PUBLIK

Memahami Politik Jokowi Hari Ini



Oleh: **Hafis Azhari**
Peneliti historical memory, pengarang novel Pikiran Orang Indonesia dan Perasaan Orang Banten

Di akhir zaman ini, akan muncul pasukan-pasukan Dajjal berikut jutaan pengikutnya, yang bukan hanya dari golongan umat Yahudi melainkan juga dari orang-orang musyrik di kalangan umat Islam, Kristen dan lain-lain. Memang, banyak dari kalangan Yahudi yang mula-mula tertarik oleh agenda dan propaganda Dajjal, tetapi tidak menutup kemungkinan, sebagian kaum Yahudi (yang beriman) akan berpindah haluan menjadi pendukung-pendukung Imam Mahdi, karena ketertarikan mereka pada sejarah hidup Rasulullah sebagai keluhur Sang Imam, yang konsisten memelihara hidup bersahaja, zuhud, ikhlas, serta menolak pola hidup yang merugikan seperti ujub, riya, sum'ah dan seterusnya.

Dalam surat al-Maidah ayat 82 secara eksplisit dijelaskan tentang datangnya masa, ketika permusuhan paling sengit dan brutal ditujukan kepada orang-orang beriman, yakni mereka dari kalangan umat Yahudi dan orang-orang musyrik. Sebaliknya, sebagian dari kaum Nasrani yang memelihara sikap welas asih dan kerendahan-hati, justru akan menjadi sahabat-sahabat yang paling setia dalam perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan.

Orang-orang musyrik yang menyimpang dari jalan Tauhid, termasuk dalam golongan orang-orang fasik yang memeluk agama tertentu (termasuk Islam), namun lebih mementingkan urusan dunia-wi ketimbang negeri akhirat yang kekal dan abadi. Mereka adalah golongan yang menyimpang, dan akan mudah terhasut oleh provokasi dan iming-iming yang disodorkan kaum Dajjal, karena lebih mementingkan kesenangan yang bersifat instan dan sesaat.

Dalam hadis Nabi (H.R. Ibnu Majah) dijelaskan tentang sebagian dari kalangan muslimin yang akan mudah terprovokasi oleh bujuk rayu Dajjal, di antaranya mereka yang mudah menghasut sesama umat Islam, serta gampang mengkafir-kafirkan mazhab lain. Padahal, tadinya mereka adalah penganut Islam yang taat, ahli ibadah, bahkan hafal Al-Quran, namun mereka tidak memahami kandungan maknanya tetapi hanya teks dan huruf yang dibaca sampai kerongkongan saja (baca: "Agama Tanpa Akal dan Hati Nurani", kompas.id).

Untuk itu, perlu saya peringatkan kepada para da'i, mubalig, juga pengusaha muda yang banyak berkolaborasi dengan elit-elit politik di negeri ini, berhati-hatilah, waspadalah, mengingat rentannya dunia usaha dan tokoh agama yang banyak bersentuhan dengan dunia publik. Bahwa, dalam sepanjang sejarah kemanusiaan, mereka akan mudah direkrut oleh kaum politisi dan pengusaha dengan segala bujuk rayu kemegahan duniawi yang menjadi motor perjuangan mereka.

Dari banyak sisi, kondisi umat Islam di akhir zaman ini sangat identik dengan kehidupan masyarakat Jahiliyah di era Nabi Muhammad. Banyak di antara mereka yang kembali kepada berhala-berhala dalam bentuk benda pusaka dan dewa-dewi leluhur, bahkan kodok-kodok yang sengaja dipelihara berkat petuah Sang Dukun dari gunung-gunung yang dianggap keramat, seperti Gunung Kawi, Kemukus, Lawu, Salak, Karang dan seterusnya. Di depan publik mereka mengaku menyembah Allah, bersyahadat, bahkan berpolitik dengan rajin melakukan sembahyang. Namun, mereka yang masih sibuk memberhalakan harta-benda dan keuntungan materialisme, tak ubahnya dengan tabiat dan pola hidup leluhur mereka, yang pernah berkuasa selama 32 tahun (Orde Baru) dengan memanfaatkan para pakar dan akademisi Barat, dengan bermodalkan tirakat dan bersemedi di puncak gunung-gunung misterius itu.

Rezim Soeharto hingga Jokowi cukup mahir bekerjasama dengan kekuatan kapitalisme dan hedonisme, berikut bujuk rayu dan tipuan mistiknya. Keduanya terampil membentuk kabinet baru sambil merekrut mereka yang berideologi dan berpandangan Baratsentris, kemudian melompat lagi menerima tawaran hutang dari para pemodal dan investor Cina. Tak lama kemudian, mereka sengaja mempertontonkan aksi-aksinya (tanpa malu-malu), memberi pakan kodok-kodok piaraannya, yang seakan telah memberinya "hidayah" agar dapat melompat dengan cepat, dari satu kebohongan ke kebohongan lain, agar cari selamat sendiri, serta menyelamatkan anak-cucunya sendiri.

"Jangan ragu-ragu, lompatlah seperti kodok, Anakku, ingatlah petuah leluhur dan pendahulumu, kau akan sanggup berkuasa selama bangsa ini hanya mengandalkan rasionalitas, diselubungi keangkuhan intelektual dan spiritual, serta dibutakan dan dininabobokan oleh program-program ekonomi-politik dan kebudayaan yang cenderung Baratsentris, serta lebih mengutamakan kesenangan dan kenikmatan duniawi," demikian ujar sang Bapak dengan suara memelas.

Memang buah yang beracun tidak akan jatuh dari pohon durian maupun pohon mangga. Itikad buruk untuk mempertahankan kekuasaan dan pundi-pundi duniawi, yang dihasilkan oleh semangat kebohongan, kelak akan terus-menerus bermutasi menjadi dusta-dusta dan kebohongan baru. Dan dosa-dosa besar yang terlampau menimbun, tampaknya sulit untuk ditemukan jalan keluar bagi pertobatannya. Itulah yang membuat mulut Firaun (Ramses II) yang dipenuhi pasir laut, tak bisa mengucap satu patah kata pun, ketika dia telah mengakui keunggulan Tuhannya Musa *(Rabbu Musa)* ketimbang dirinya yang maha lemah dan tak berdaya. Padahal, dia telah banyak membangun sarana dan infrastruktur bagi negeri Mesir, akan tetapi sifat hasad dan kedengkiannya pada Nabi Musa, telah menghanguskan amal-amal baiknya selama ini, bagaikan api-api yang melahap dan menggerogoti kayu bakar.

Di antara prestasi Jokowi yang layak dibanggakan di awal kepresidenannya (saat masih anggota PDI-P) adalah membiarkan generasi muda berkiprah, hingga mekarnya kebebasan ekspresi bagi tumbuhnya semangat demokrasi dan egalitarianisme di Indonesia. Di awal-awal kekuasaannya, dia sudah berada di jalur yang tepat, membela kaum yang termarjinalkan (termasuk anak-cucu PKI), bagaikan keberhasilan menanam pohon dan merawat akar-akarnya hingga kokoh. Namun pada akhirnya, ketika pohon itu tumbuh dan siap akan berbuah, dia sendiri yang menuangkan cairan herbisida di sekitar pohon, hingga akar-akarnya menjadi keropos dan tumbang.

Dalam novel yang saya tulis, *"Pikiran Orang Indonesia"* (2014) ditegaskan, bahwa kekuasaan yang diawali dengan kekerasan kelak akan melangkah dengan pertentangan yang tak berkesudahan. Itulah yang mengakhiri babak Ordo Soeharto (Orde Baru) yang diselimuti kekerasan demi kekerasan di sana-sini. Tetapi, yang dilakukan Jokowi bukan mengawalinya dengan "kekerasan" melainkan dengan kebohongan politik yang tampaknya halus dan lembut (bohong putih), namun dia tak berhasil mengakhirinya dengan kedamaian, dikarenakan candu kebohongan itu sudah terlampau melekat dalam jiwa dan pikirannya.

Itulah yang membuat PDI-P mengeluarkan dirinya sebagai anggota. Meskipun sebenarnya, PDI-P angkat tangan dan tak mau memikul beban berat kebohongan yang dibuat-buat oleh seorang anggotanya. Pada prinsipnya, Jokowi sudah terlena dan lupa diri "menikmati pujian".

Untuk itu, saya mengapresiasi nasihat-nasihat cerdas dari mubalig Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) yang ditujukan kepada para mubalig dan pendakwah muda seperti Gus Baha, Habib Jafar, Felix Siauw, UAS, UAH, Arrazy Hasyim, hingga para politisi senior seperti Amien Rais, Megawati Soekarnoputri hingga Panji Gumilang. Wahai Bapak-Ibu terhormat, dan adik-adik tercinta, *"Sekarang zaman medsos, maka berhati-hatilah dengan pujian makhluk."*

Secara pribadi, kadang saya terpukau mendengar ceramah-ceramah yang cerdas dan jenius dari adik-adik mubalig dan pendakwah agama. Tidak jarang di antara mereka berceramah dengan sangat jenaka, hingga penonton tersenyum bahkan tertawa terpingkal-pingkal. Banyak juga yang pintar dan fasih memaknai hadis atau menafsirkan Al-Quran, bahkan menghafal riwayat-riwayat kenabian sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Meskipun, kadang saya mengelus dada menyaksikan sebagian yang seakan "terlena" ketika sedang disanjung dan ditertawakan ribuan jamaahnya.

Boleh saja, mereka punya hak membela diri, bahwa terlena, lupa diri, lalai, bahkan ngantuk dan butuh tidur adalah sifat dasar yang sangat manusiawi. Dan sifat semacam itu pun ada pada diri kita juga, tetapi berhati-hatilah jika terlampau menikmati pujian saat ditertawakan oleh mereka. Sebab, menurut saya (sebagai Nahdliyyin), bahkan Gus Dur pun bukan manusia sempurna dan banyak kekurangannya dalam hal-hal semacam ini.

Ada batasan ego dan kesombongan, bahkan keangkuhan intelektual bagi seorang pemimpin muslim yang dikaruniai kejeniusan dan kecerdasan spiritual. Di sisi lain, ada etika bertuhan dan bertauhid, di saat rahasia *(sirr)* Allah cukup diketahui oleh mereka yang memiliki sifat arif dan bijaksana, sebagai pancaran rahman-rahim, tanpa perlu disampaikan kepada publik. Namun secara manusiawi, kadang Gus Dur juga tergoda oleh bujuk-rayu mereka yang terlampau memuji dan menyanjungnya, hingga terjebak ke dalam sikap *like or dislike,* bahkan ber-*wishful-thinking* secara berlebihan.

Untuk itu, kita bisa memaklumi ketika Allah mengambil kembali anugerah kepemimpinan yang sudah disandang dalam genggamannya. Itu bukan suatu kemurkaan dan kebencian, melainkan justru pertolongan dan kasih-sayang Allah atas segala pengaruh dan godaan singgasana duniawi yang hanya bersifat fana dan sementara.

Kembali kepada nasihat Aa Gym (dari etnis Sunda) yang pantas dicermati secara seksama. Setelah beliau mendalami berbagai literatur keislaman tentang sufisme dan "ilmu hikmah", kemudian mendirikan pesantren, merintis perusahaan, menjadi mubalig kondang dengan jutaan jamaah yang terpesona mendengar fatwa dan tausiahnya, Aa Gym terus melangkah dengan segala rintangan dan cobaan hidup yang dialaminya.

Beliau telah melanglang buana di dunia usaha, menjadi milyuner dengan pesona religi serta aset yang dihasilkan dari dakwah keislaman di Indonesia hingga mancanegara. Sampai kemudian, di usia 60-an setelah mengalami pahit-getir rintangan dan beragam ujian hidup, Aa Gym sampai pada kesimpulan: *"Berhati-hatilah dengan pujian dan sanjungan, karena mendapat ujian dengan disanjung dan dikagumi manusia, demi Allah, itu lebih berbahaya ketimbang ujian berupa musibah dan kehinaan."* (*)

BANTEN POS
Inspirasi dan Semangat Baru Banten

PEMBINA
Kiki Iswara Dharmayana

KOMISARIS UTAMA
Karim Paputungan

KOMISARIS
Maria Hanief

DIREKTUR
Rumi Nugraha dan M. Fahmi

PT BANTEN BERITA MERDEKA
Kantor: Ruko RDM, Jln. TB Suwandi/Lingkar Selatan
Blok D, No.3, Kota Serang, Banten
Telephon/Fax: (0254) 407 8285
No. Rek: Bank BJB - 0018 21501 2001
BCA -2454 061 704
(a/n PT. BANTEN BERITA MERDEKA)

Percetakan:
WAHANA SEMESTA INTERMEDIA
Jl. Jampang No. 99A, Bekasi. Telp: 0811 1071 633

DEWAN REDAKSI: Kiki Iswara Darmayana, Ratna Susilowati, M. Fahmi, Saepudin, Chandra Magga | **PEMIMPIN PERUSAHAAN:** Saepudin | **PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB:** Chandra Magga | **REDAKTUR PELAKSANA:** Azmart Tusnedi | **REDAKTUR:** Ghuroofie Dzhillilhub, Stefano, Dedi Rustandi | **SEKRETARIS REDAKSI:** Cahya Andini | **REPORTER:** CH Widodo Haidar, Dede Suhada, Suganda, M. Wahyu, Taufiq Solehudin, Edwin Mahesa Pardede | **PENGEMBANGAN BISNIS:** Sobar Rohmat | **IKLAN:** Zulfa Nadira (Manager), Dody Fitriadi | **FOTOGRAFER:** Dziki Oktomauliyadi | **PRA CETAK & PERWAJAHAN:** Supriadi (Manager), Fauzi Sandi, M Sy Ian Sangadji | **GRAFIS:** Ahmad Bukhori | **ACCOUNTING:** Ifroh Hardianti | **ADMINISTRASI KEUANGAN:** Azi Abdurohman | **ADMINISTRASI PAJAK:** Nadia Al Vani | **ADMINISTRASI:** Nia Aryanti | **PEMASARAN:** Eply Wahyudi

PERWAKILAN TANGERANG :
Komplek Green Garden Blok A-1, No. 2
Jalan MH Thamrin, Kota Tangerang, Banten

PERWAKILAN JAKARTA :
Gedung Graha Pena, Lantai 5
Jalan Kebayoran Lama No.12,
Jakarta Selatan
Telp/Fax: 021 - 53699624

PERCETAKAN :
PT. WAHANA SEMESTA INTERMEDIA

TARIF IKLAN

TARIF IKLAN		ADVERTORIAL		IKLAN CILIK/BARIS
Hitam Putih (BW)	Rp. 47.000/mm kolom	Hitam Putih (BW)	Rp. 47.000/mm kolom	Rp. 23.000/baris
Warna (FC)	Rp. 69.000/mm kolom	Warna (FC)	Rp. 69.000/mm kolom	- Minimal 3 baris
Hitam Putih Hal. 1	Rp. 91.000/mm kolom	SOSIAL/KELUARGA		- Maksimum 7 baris
Warna Hal. 1	Rp. 134.000/mm kolom	Hitam Putih (BW)	Rp. 30.500/mm kolom	
		Warna (FC)	Rp. 54.500/mm kolom	

WARTAWAN BANTEN POS SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APAPUN DARI NARASUMBER



Anggarkan Sekolah Gratis 2027 Capai Rp650 Miliar

SERANG, BANPOS - Pemprov Banten terus mematangkan perencanaan anggaran untuk tahun 2027 mendatang termasuk untuk program sekolah gratis (Prostis) yang menjadi program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Andra Soni dan A Dimyati Natakusumah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Banten. Deden Apriandhi Hartawan mengungkapkan bahwa anggaran untuk program sekolah gratis pada tahun 2027 mendatang diproyeksikan melonjak hingga mencapai kisaran Rp650 miliar.

Penambahan ini, kata dia, sejalan dengan bertambahnya jumlah angkatan pada sekolah swasta yang pembiayaannya ditanggung Pemprov Banten.

Deden mengungkapkan, program sekolah gratis ini merupakan salah satu bentuk bantuan langsung pemerintah kepada masyarakat yang porsinya terus ditingkatkan dari tahun sebelumnya.

"2027 itu nanti kurang lebih sekitar Rp650-an (miliar rupiah) untuk sekolah gratis," ujar Dede, Minggu (8/11).

Ia menjelaskan, pada tahun 2026, anggaran untuk sekolah gratis yang baru mencakup dua angkatan dialokasi sekitar Rp400 miliar. Sementara itu, pada tahun 2027, cakupannya akan diperluas hingga mencapai tiga angkatan.

"Jadi, tahun ini kan cuman dua angkatan, itu Rp400-an (miliar, red). 2027 itu kurang lebih Rp650 miliar untuk sekolah gratis. Itu kan bantuan kepada masyarakat," terangnya.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten Jamaludin mengakui adanya penambahan anggaran untuk program sekolah gratis ditahun 2027 mendatang. Penambahan itu seiring dengan bertambahnya jumlah penerima bantuan ditahun yang sama.

"Ditahun 2027 nanti, sementara ini kita usulkan penambahan anggaran sampai Rp520 miliaran, tetapi usulan itu masih belum final. Kalau untuk anggaran tahun 2026 ini jumlahnya Rp340 miliaran," katanya.

Jamaludin menerangkan, jumlah peserta didik penerima bantuan untuk tahun ajaran 2026/2027 sekira 130 ribu peserta. Jumlah itu berasal dari Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Khusus (SKh), serta sekolah swasta atau Madrasah Aliyah (MA).

"Jadi terkait sekolah gratis tahun ajaran ini ada 120 ribu dari SMA, SMK, dan SKh ditambah Aliyah 10 ribu jadi kurang lebih 130 ribu. Jadi anggaran yang tadi itu khusus untuk membiayai biaya pendidikan anak-anak kita," katanya.(MPD/AZM)

Pemprov Alihkan Pembayaran Gaji P3K 2027

SERANG, BANPOS - Pemprov Banten berencana segera Alihkan Pembayaran Gaji P3K Paruh Waktu ke Pemerintah Pusat pada tahun 2027 mendatang. Kebijakan strategis tersebut diambil seiring adanya rencana pelimpahan kewenangan pembiayaan pegawai kontrak dari daerah ke tingkat pusat. Melalui langkah ini, alokasi dana yang semula disiapkan untuk gaji pegawai akan digeser guna membiayai program pembangunan lainnya.

Secara keseluruhan, jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja penuh waktu maupun paruh waktu di Pemprov Banten mencapai 18.449 orang. Dari total tersebut, tercatat ada 4.631 pegawai paruh waktu yang meliputi 3.151 tenaga teknis, 1.278 guru, dan 202 tenaga kesehatan. Adapun total alokasi dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2027 untuk menggaji seluruh pegawai itu mencapai Rp1 triliun.

"Itukan baru RKUA (Rancangan Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) kan belum final, APBD belum di ketok, kalau belum diketok belum masalah," kata Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah, Minggu (8/11).

Dengan adanya peralihan kewenangan tersebut, sedikitnya anggaran sebesar Rp400 miliar lebih dapat dialihkan untuk mendanai program kerja prioritas lainnya. Meski demikian, pemerintah daerah saat ini masih menunggu terbitnya petunjuk pelaksana serta petunjuk teknis resmi dari pemerintah pusat. Selain itu, pembahasan intensif bersama Organisasi Perangkat Daerah terkait terus dilakukan agar pelimpahan wewenang ini tidak menimbulkan persoalan.

Dimyati memastikan bahwa rencana pelimpahan kewenangan pembayaran gaji tersebut sama sekali tidak akan menggangu jalannya program pembangunan daerah. Sebaliknya, pergeseran pos belanja pegawai itu justru memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah provinsi pada tahun depan. Penyesuaian alokasi anggaran dinilai masih sangat fleksibel untuk dilakukan meskipun rancangan anggaran daerah nantinya telah disahkan bersama legislatif.

"Kalau APBD sudah diketok pun masih bisa dilakukan perubahan anggaran, gampang itu, bukan Alquran dan Hadis, jadi tenang saja ya enggak akan ada masalah," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandhi Hartawan menjelaskan bahwa pihaknya tetap menganggarkan pembiayaan gaji pegawai hingga tahun 2027. Langkah antisipatif ini diambil lantaran belum adanya kepastian hukum mengenai rincian skema pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat. Kejelasan aturan teknis sangat dibutuhkan guna memastikan kategori pegawai paruh waktu di sektor mana saja yang akan ditanggung pusat.

Oleh sebab itu, pemerintah daerah enggan terburu-buru menghapus pos anggaran gaji tersebut sebelum regulasi resminya diterbitkan oleh pemerintah pusat. Apabila nantinya hanya sebagian pegawai di sektor pendidikan atau kesehatan yang dialihkan, maka sisanya tetap menjadi tanggungan daerah. Di sisi lain, potensi berkurangnya beban belanja pegawai ini diharapkan tidak diikuti dengan pemotongan Dana Alokasi Umum maupun Transfer ke Daerah.

"Entar kalau kita hapus duluan terus ternyata hanya PPPK tertentu yang dibayar Pemprov, kan kita kasihan," ujar Deden.(MPD/AZM)

Konsolidasi Gerakan Rakyat

Kawal Kedaulatan Ekonomi Nasional

SERANG, BANPOS - Dinamika politik nasional saat ini dinilai menjadi momentum tepat untuk memperkuat konsolidasi Gerakan Rakyat secara menyeluruh. Langkah strategis itu didorong oleh Sekretaris Lingkar Pemuda Indonesia (LPI), Muhammad Kahfi Khaddafi, guna memperjuangkan kedaulatan ekonomi bangsa. Berbagai elemen masyarakat diminta bersatu membentuk front persatuan nasional untuk melawan dominasi kapitalisme global yang kian menguat.

Perkembangan situasi politik belakangan ini perlu dibaca lebih luas dari sekadar dinamika hubungan antarelite kekuasaan semata. Polemik dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto hingga terbukanya komunikasi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menjadi sorotan.

Kondisi tersebut membuka ruang pertemuan berbagai kekuatan nasional dalam merumuskan agenda reforma agraria dan penguatan industri nasional. "Momentum politik saat ini jangan hanya dibaca sebagai perubahan peta koalisi atau pergeseran kepentingan elite," ujar Kahfi dalam pandangannya.

Menurut Kahfi, persoalan mendasar bangsa Indonesia bukanlah semata-mata mengenai pergantian kekuasaan maupun pertarungan elektoral belaka. Negara saat ini masih menghadapi tantangan berat berupa ketergantungan ekonomi serta ketimpangan penguasaan sumber daya alam. Selain itu, distribusi hasil pembangunan nasional dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kesejahteraan masyarakat luas di berbagai daerah.

Persoalan ketimpangan penguasaan tanah yang dihadapi kaum petani hingga kini masih terus berlangsung tanpa penyelesaian tuntas. Di sisi lain, masyarakat adat kerap berhadapan langsung dengan ancaman nyata kehilangan ruang hidup mereka secara paksa.

Oleh sebab itu, pengembalian amanat Pasal 33 UUD 1945 sebagai fondasi kebijakan ekonomi nasional menjadi sangat mendesak. "Pasal 33 UUD 1945 tidak boleh berhenti sebagai kutipan dalam pidato kenegaraan," tegasnya.

Arah pembangunan ekonomi nasional wajib difokuskan pada penguatan industri dalam negeri serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan secara konsisten. Pertumbuhan investasi semestinya tidak hanya diukur dari besarnya modal masuk, melainkan dari pemerataan manfaat bagi kesejahteraan warga. Sementara itu, terbukanya komunikasi politik antara Prabowo dan Megawati dinilai mampu membuka peluang dialog kemandirian ekonomi bangsa.

Kendati demikian, Kahfi mengingatkan agar seluruh elemen masyarakat sipil tidak kehilangan independensi ketika berkomunikasi dengan lingkar kekuasaan. Pembentukan front taktis persatuan nasional diusulkan guna mempertemukan kelompok tani, buruh, organisasi pemuda, intelektual, hingga elemen politik.

Penyatuan barisan tersebut tidak menuntut keseragaman ideologi, melainkan berlandaskan kesepakatan bersama terhadap agenda kedaulatan pangan dan energi. "Persatuan nasional bukan berarti gerakan rakyat harus kehilangan daya kritis," katanya.

Wadah konsolidasi yang digagas itu ditegaskan bukan bertujuan untuk melayani kepentingan elektoral maupun menjadi barisan pendukung kekuasaan. Sebaliknya, penyatuan berbagai kekuatan sosial tersebut diarahkan guna mendorong terwujudnya kemandirian bangsa Indonesia secara utuh dan berdaulat. Seluruh elemen masyarakat sipil harus tetap menjaga keberanian dalam mengoreksi setiap kebijakan negara yang menyimpang dari konstitusi.(MYU/AZM)

Betonisasi Jalan Persada Banten Dimulai Bertahap



SERANG, BANPOS - Pemkot Serang melakukan betonisasi jalan di kawasan Perumahan Persada Banten, Kecamatan Walantaka. Namun, dari total rencana pembangunan sepanjang kurang lebih 500 meter, pengerjaan tahap awal baru menyasar 61,5 meter dengan anggaran sekitar Rp350 juta.

Walikota Serang Budi Rustandi turun langsung meninjau lokasi pengerjaan pada Jumat (6/11). Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan proyek peningkatan infrastruktur jalan berjalan sesuai rencana.

Pada tahap pertama, betonisasi dilakukan sepanjang 61,5 meter dengan lebar 9 meter. Proyek tersebut dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Serang dengan nilai sekitar Rp349 juta hingga Rp350 juta.

Budi mengatakan, percepatan pembangunan sengaja dilakukan agar masyarakat bisa segera merasakan manfaat dari anggaran yang bersumber dari pajak.

"Alhamdulillah kita bisa bergerak lebih cepat. Maksud dan tujuannya adalah agar masyarakat bisa segera merasakan hasil dari uang pemerintah. Karena ini adalah pajak dari rakyat yang kita kembalikan lagi untuk kepentingan rakyat," ujar Budi di lokasi peninjauan.

Meski demikian, pembangunan jalan di kawasan tersebut belum sepenuhnya tuntas. Pemkot Serang berencana melanjutkan betonisasi pada tahun depan hingga mencapai panjang kurang lebih 500 meter.

Budi mengungkapkan, keterbatasan waktu pada pelaksanaan anggaran perubahan menjadi alasan pengerjaan belum bisa dilakukan sekaligus. Untuk menuntaskan seluruh ruas jalan tersebut, Pemkot Serang memperkirakan membutuhkan anggaran lebih dari Rp2 miliar.

"Karena ini anggaran perubahan dengan waktu yang terbatas, tidak memungkinkan untuk dilakukan lelang besar saat ini. Insyaallah tahun depan akan kita teruskan sampai selesai kurang lebih 500 meter. Kebutuhan anggarannya sekitar Rp2 miliar lebih," jelasnya.

Budi juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, khususnya pengguna jalan, apabila aktivitasnya terganggu selama proses pengerjaan berlangsung. Ia meminta masyarakat turut mendukung program pembangunan infrastruktur di Kota Serang.

"Bagi para pengguna jalan, saya memohon maaf apabila aktivitasnya menjadi terganggu. Ini semua demi kebaikan kita bersama. Mohon dukungan dan doanya agar program-program infrastruktur di Kota Serang berjalan dengan baik dan lancar," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala DPKPP Kota Serang, Arif Rahman Hakim menjelaskan, peningkatan jalan melalui APBD Perubahan tidak hanya dilakukan di Perumahan Persada Banten. Sejumlah kawasan perumahan lainnya juga masuk dalam daftar pengerjaan.

"Di sini ya di Persada, Citra Gading, Serang Hijau, Puri Anggrek, dan Kelapa Gading," ujar Arif saat dikonfirmasi mengenai titik-titik perbaikan jalan.

Khusus di Perumahan Persada Banten, Arif menyebut pengerjaan mencakup jalan dengan lebar 9 meter dan panjang 61,5 meter. Adapun pelaksanaan proyek tersebut ditargetkan selesai dalam waktu 60 hari kalender.(ACG/AZM)

UNPAM Serang Bahas Tantangan Akuntansi Era Global

SERANG, BANPOS - Program Studi Akuntansi Universitas Pamulang (UNPAM) Kampus Serang menggelar webinar nasional guna mengupas Tantangan Akuntansi di Era Global pada Kamis (5/11). Kegiatan bertema Integrasi Standar Akuntansi Keuangan dengan Isu Global melalui Zoom Meeting ini diikuti 1.084 peserta dari kalangan akademisi, dosen, mahasiswa, hingga praktisi.

Acara ini dihadiri Direktur UNPAM Kampus Serang Imam Sofi'I bersama Sekretaris Zamzam Nurhuda Turut hadir Wakil Direktur I Juhaeri, Wakil Direktur II Edy Mulyanto, dan Wakil Direktur III Heri Kusnadi.

"Kita dapat bekerja dari mana saja, sehingga kemampuan berdaya saing dan mengikuti perkembangan menjadi hal yang sangat penting," ungkap CEO & Founder Fast Consulting, VP Finance di Acitivate Asia Group, sekaligus dosen Magister Akuntansi Universitas Budi Luhur Riyan Harbi Valdiansyah.

Ketua Pelaksana Ingga Maulana menyampaikan bahwa forum ilmiah tersebut menjadi ruang diskusi untuk menyamakan perspektif mengenai peran profesi akuntansi. Menurut Maulana, perkembangan dunia usaha dan perubahan standar akuntansi menuntut para akademisi maupun praktisi agar terus memperbarui pengetahuan serta kompetensi.

Sementara itu, Sofi'i menekankan pentingnya membangun atmosfer akademik yang terbuka dan adaptif karena proses pembelajaran dapat berlangsung melalui berbagai media. Perkembangan teknologi serta perubahan standar akuntansi perlu dikaji bersama agar dunia akademik mampu menghubungkan teori dengan kebutuhan dunia kerja.

"Perusahaan tidak cukup hanya memperhatikan laporan keuangan, tetapi juga perlu mengungkapkan risiko dan dampak perubahan iklim agar mampu menghadapi tantangan ekonomi dan menjaga keberlangsungan usaha," jelas Associate director-Advisory Big Four Accounting Firm Irfan Sulaiman Suhaeri.



Ketua Program Studi Akuntansi Iroh Rahmawati menilai profesi akuntan kini tidak hanya dituntut menguasai aspek pelaporan keuangan semata. Lebih dari itu, lulusan wajib mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, perubahan regulasi, serta isu keberlanjutan di tingkat nasional maupun global.

Dalam diskusi yang dipandu moderator Rupianna Tambunan, Suhaeri turut memaparkan dampak perubahan temperatur bumi yang memicu kerugian ekonomi. Kondisi tersebut mendorong perusahaan lebih memperhatikan risiko lingkungan melalui penyusunan Sustainability Reporting demi menjaga keberlangsungan usaha.(MPD/AZM)

ISTIMEWA



Walikota Cilegon, Robinsar membuka acara MTQ.

346 Peserta Ikuti MTQ Ke-25 Kota Cilegon

CILEGON, BANPOS – Sebanyak 346 peserta dari delapan kecamatan mengikuti Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-25 tingkat Kota Cilegon 2026. Ajang tahunan tersebut dipusatkan di Kecamatan Ciwandan dan resmi dibuka Walikota Cilegon Robinsar, Jumat (6/11) malam.

MTQ yang mengusung tema "Menguatkan Generasi Qurani dalam Mewujudkan Cilegon Jujur, Amanah, dan Religius" itu berlangsung selama dua hari, 7-8 November 2026. Sebanyak 11 cabang dan 28 golongan diperlombakan dengan lokasi pertandingan tersebar di 12 majelis di wilayah Kecamatan Ciwandan.

Ketua Panitia MTQ ke-25 Rahmatullah mengatakan, kegiatan tersebut menjadi wadah untuk menggali sekaligus meningkatkan potensi generasi muda dalam bidang Al-Qur'an. Melalui ajang ini, masyarakat juga diharapkan semakin terdorong menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

Dari total peserta, Kecamatan Ciwandan mengirimkan kafilah terbanyak dengan 62 orang. Berikutnya Kecamatan Grogol sebanyak 51 peserta, Citangkil 49 peserta, Pulomerak 47 peserta, Jombang 46 peserta, Cibeber 37 peserta, Cilegon 33 peserta, dan Purwakarta 21 peserta. "MTQ ke-25 Tingkat Kota Cilegon tahun ini mempertandingkan 11 cabang dan 28 golongan. Pelaksanaan musabaqah berlangsung pada 7 hingga 8 November 2026 dengan lokasi perlombaan yang tersebar di 12 majelis di wilayah Kecamatan Ciwandan," kata Rahmatullah.

Untuk mendukung kelancaran perlombaan, panitia menyiapkan 30 petugas seksi musabaqah dan 92 dewan hakim. Jumlah dewan hakim tersebut terdiri atas 83 penilai, enam pengawas, dan tiga koordinator.

Sementara itu, Walikota Cilegon Robinsar mengapresiasi capaian qari dan qariah asal Cilegon yang selama ini mampu bersaing dalam berbagai ajang di tingkat provinsi, nasional, hingga internasional. Menurutnya, prestasi tersebut menjadi bukti bahwa pembinaan generasi Qurani di Kota Cilegon memiliki potensi untuk terus dikembangkan. "Kalau berbicara tentang ahli Al-Qur'an dan warga Cilegon yang berprestasi di bidang Al-Qur'an, insyaallah kita tidak kekurangan. Banyak putra-putri Cilegon, baik generasi senior maupun generasi muda, yang telah menunjukkan prestasi di berbagai ajang," ujar Robinsar.

Sebagai bentuk penghargaan terhadap prestasi tersebut, Pemkot Cilegon telah memberikan sejumlah apresiasi kepada putra-putri daerah yang mengharumkan nama kota. Salah satunya berupa hadiah umrah bagi tiga peserta berprestasi. Robinsar juga mengingatkan dewan hakim agar menjalankan tugas secara profesional dan objektif. Ia menegaskan, penilaian harus benar-benar mencerminkan kemampuan peserta sehingga mereka yang terpilih merupakan kafilah terbaik untuk mewakili Cilegon pada kompetisi tingkat berikutnya. "Kami berharap kepada para dewan hakim agar memberikan penilaian secara objektif. Bukan hanya sekadar angka, tetapi benar-benar mencerminkan kualitas peserta. Mereka yang terpilih nantinya harus menjadi putra-putri terbaik yang layak mewakili Kota Cilegon di tingkat provinsi maupun nasional," tegasnya. (CR-03/PAY)

SUGANDA/BANTEN POS



Kepala Satpol PP Kota Tangerang "Teguh Supriyanto" (Kanan) saat melakukan penertiban bangunan liar di jalan Arya kemuning Periuk Jum'at (06/11).

Bangunan Liar di Trotoar Jalan Arya Kemuning Dibongkar

KOTA TANGERANG, BANPOS – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang membongkar sejumlah bangunan liar yang berdiri di sepanjang Jalan Arya Kemuning, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang. Penertiban yang melibatkan petugas gabungan TNI-Polri tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi trotoar sebagai fasilitas pejalan kaki.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Teguh Supriyanto mengatakan, pembongkaran dilakukan setelah pemilik bangunan beberapa kali mendapat sosialisasi dan imbauan untuk membongkar bangunannya secara mandiri. Namun, karena masih terdapat bangunan yang berdiri di atas fasilitas umum, petugas akhirnya melakukan pembongkaran menggunakan alat berat. "Kami mengambil langkah tegas menertibkan sejumlah bangunan liar yang selama ini menyalahgunakan trotoar. Kemarin, kami juga menerjunkan alat berat untuk membongkar langsung bangunan liar tersebut," ujar Teguh, Jumat (6/11).

Menurut Teguh, penertiban tersebut merupakan tindak lanjut Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Regulasi tersebut melarang pendirian bangunan di atas fasilitas umum, seperti trotoar, bahu jalan, jalur hijau, dan saluran air tanpa izin dari pejabat berwenang.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah memiliki kewenangan melakukan penertiban terhadap bangunan yang melanggar ketentuan. Tahapannya dimulai dari sosialisasi dan pemberian peringatan hingga pembongkaran apabila pemilik tidak menindaklanjuti imbauan tersebut. "Sebelum dibongkar, kami sudah melakukan sosialisasi berkala. Namun, karena ada sejumlah bangunan yang belum dibongkar, kami terpaksa membongkarnya saat itu juga sesuai dengan peraturan yang berlaku," katanya.

Teguh menambahkan, penertiban juga mengacu pada ketentuan peraturan daerah mengenai ketertiban umum. Pemkot Tangerang berharap, setelah pembongkaran, trotoar di sepanjang Jalan Arya Kemuning dapat kembali dimanfaatkan masyarakat sebagai jalur pejalan kaki yang aman dan nyaman. Ia juga mengajak masyarakat turut menjaga fasilitas umum agar tidak kembali digunakan untuk kepentingan yang melanggar peruntukannya. Upaya tersebut dinilai penting untuk menciptakan ketenteraman dan ketertiban lingkungan. (SUG/PAY)

Pokir dan Pengadaan Cilegon Jadi Sorotan KPK

CILEGON, BANPOS - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan sejumlah catatan terhadap tata kelola pemerintahan di Kota Cilegon. Dua aspek yang menjadi perhatian adalah penyusunan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon Ahmad Aziz Setia Ade Putra mengatakan, evaluasi tersebut melibatkan Walikota Cilegon, Ketua DPRD, Sekda, Inspektorat, serta Sekretariat DPRD (Sekwan). Dalam penyusunan pokir, KPK mengingatkan agar usulan anggota DPRD benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Usulan program juga tidak boleh melampaui wilayah konstituen yang diwakili anggota dewan. "Memang seharusnya pokir ini sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan yang menjadi daerah konstituennya. Jangan sampai lintas daerah, misalnya dia di dapil mana, tetapi mengusulkan di luar dapil itu," kata Aziz, Jumat (6/11).

MUHAMAD ELFAN SETIAWAN/ BANTEN POS



Sekda Kota Cilegon, Ahmad Aziz Setia Ade Putra, mengatakan KPK mengirimkan sejumlah catatan untuk Pemkot Cilegon, Jumat (6/11).

Selain lokasi usulan, substansi pokir juga menjadi perhatian. Menurut Aziz, anggota DPRD seharusnya menyampaikan persoalan dan kebutuhan masyarakat, bukan menentukan secara terperinci bentuk kegiatan maupun besaran anggaran yang harus dialokasikan.

Penentuan jenis kegiatan, teknis pelaksanaan, hingga kebutuhan pembiayaan merupakan kewenangan organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Usulan DPRD selanjutnya menjadi bahan bagi perangkat daerah untuk dikaji berdasarkan kebutuhan dan kewenangannya. Aziz mencontohkan, apabila masyarakat membutuhkan peningkatan kualitas jalan atau perbaikan drainase, anggota dewan cukup menyampaikan persoalan tersebut. Adapun bentuk penanganan dan pelaksanaannya diserahkan kepada OPD terkait. "Seharusnya dewan hanya menyampaikan, misalnya ini butuh peningkatan jalan, sudah itu saja. Jalan atau infrastrukturnya kurang baik, apa jalannya, drainasenya. Itu nanti OPD yang mengeksekusi," ujarnya.

Di luar persoalan pokir, KPK juga memberikan perhatian terhadap proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Cilegon. Seluruh tahapan pengadaan diminta berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pedoman yang ditetapkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). "Kalau untuk dari sisi proses pengadaan barang dan jasa, ya harus menyesuaikan dengan surat yang dikeluarkan oleh LKPP. Intinya seperti itu," tuturnya. (CR-03/PAY)

Tangerang Raya Jadi Pusat Agenda Olahraga Banten

TANGERANG, BANPOS – Wilayah Tangerang Raya menjadi pusat penyelenggaraan dua agenda olahraga tingkat Provinsi Banten pada November 2026. Kota Tangerang Selatan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Banten, sementara Kota Tangerang menggelar Festival Olahraga Masyarakat Provinsi (Forprov) II Banten.

Kedua agenda tersebut tidak hanya diarahkan untuk mendorong prestasi atlet, tetapi juga memperkuat pembinaan olahraga dan membangun budaya hidup sehat di tengah masyarakat.

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan menyiapkan 70 venue yang tersebar di tujuh kecamatan untuk mendukung pelaksanaan Porprov VII Banten. Wakil Walikota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan mengatakan, kesiapan seluruh arena pertandingan telah mencapai 90 persen dan ditargetkan rampung sebelum pembukaan resmi pada 15 November 2026.

Pilar yang juga menjabat Ketua Pelaksana Porprov mengatakan, pemeriksaan terhadap seluruh venue dilakukan berulang kali untuk memastikan fasilitas memenuhi standar penyelenggaraan pertandingan. "Kita tak hanya sekadar menyiapkan arena, tetapi juga standar yang ditetapkan dipenuhi. Ini adalah wujud komitmen Pemkot Tangerang Selatan sebagai tuan rumah dalam menyediakan fasilitas yang terbaik," kata Pilar, Minggu (8/11).

Porprov VII Banten berlangsung pada 8 hingga 23 November 2026 dengan mempertandingkan 60 cabang olahraga (cabor). Ajang tersebut diharapkan menjadi bagian penting dari pembinaan atlet daerah sekaligus tolok ukur kesiapan Banten menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) 2032.

Kepala Bidang Humas Porprov Banten 2026 Tubagus Asep Nurdin mengatakan, upacara pembukaan dijadwalkan berlangsung di Lapangan Sunburst, BSD, Kecamatan Serpong, pada 15 November 2026. Menurutnya, Panitia Pengarah dan Penasihat (Panwasrah) bersama KONI Banten juga telah merampungkan verifikasi administrasi dan ketentuan mutasi atlet. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keabsahan peserta serta memastikan kompetisi berjalan sesuai aturan. "Porprov bukan hanya soal siapa yang menang atau kalah, tetapi bagaimana kita merawat ekosistem pembinaan olahraga yang kredibel, menjunjung tinggi sportivitas, dan berkelanjutan," ujarnya.

Sementara itu, Kota Tangerang menggelar Forprov II Banten pada 7 hingga 10 November 2026. Kegiatan yang resmi dibuka Gubernur Banten Andra Soni bersama Walikota Tangerang Sachrudin di Alun-Alun Ahmad Yani, Sabtu (7/11) malam, tersebut menghadirkan puluhan Induk Organisasi Olahraga (Inorga) dengan 48 cabang olahraga masyarakat. Andra Soni mengatakan, Forprov tidak semata-mata menjadi ajang kompetisi, tetapi juga momentum untuk memperluas kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan kebugaran melalui olahraga. "Forprov II Banten ini bukan hanya ajang kompetisi, melainkan gerakan bersama untuk terus mendorong dan mengampanyekan gaya hidup sehat serta mengajak masyarakat terus bergerak. Kita harus senantiasa memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat," ujar Andra.

ANTARA/HO-PEMPROV BANTEN



Gubernur Banten Andra Soni (kedua dari kanan) dan Walikota Tengerang Sachrudin (ketiga dari kiri) mengangkat piala Festival Olahraga Masyarakat Provinsi (Forprov) yang akan diperebutkan para atlet dari delapan kabupaten/kota di Banten.

Walikota Tangerang Sachrudin menyampaikan, kepercayaan sebagai tuan rumah menjadi kesempatan untuk memperkenalkan potensi serta fasilitas olahraga di daerahnya. Sejumlah venue disiapkan di lokasi strategis, mulai dari Stadion Benteng Reborn, kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, gedung olahraga (GOR), hingga pusat perbelanjaan.

Sachrudin berharap Forprov tidak hanya menarik minat masyarakat untuk menyaksikan pertandingan, tetapi juga mendorong mereka mengenal dan mencoba berbagai jenis olahraga yang ditampilkan. "Melalui Forprov ini, kami mengajak masyarakat untuk terus bergerak dan membudayakan hidup sehat. Olahraga masyarakat dapat dilakukan oleh siapa saja dan menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari," katanya.

Ia juga mengingatkan seluruh peserta agar menjadikan Forprov sebagai ruang mempererat persaudaraan antardaerah dengan tetap mengedepankan sportivitas. (ANT/PAY)

Cegah Tumpang Tindih, Sejumlah Perda Lama Dievaluasi

MUHAMAD ELFAN SETIAWAN/BANTEN POS



Ketua DPRD Kota Cilegon Rizki Khairul Ichwan, mengatakan mengevaluasi sejumlah Perda diharapkan dapat sesuai kebutuhan masyarakat, Jumat (6/11).

CILEGON, BANPOS - DPRD Kota Cilegon mulai mengevaluasi sejumlah peraturan daerah (Perda) lama yang dinilai perlu disesuaikan dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan saat ini. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan produk hukum daerah tetap relevan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ketua DPRD Kota Cilegon Rizki Khairul Ichwan mengatakan, evaluasi dilakukan terhadap sejumlah perda yang diterbitkan dalam rentang 2001 hingga 2008. Regulasi tersebut akan dikaji untuk menentukan apakah masih dapat dipertahankan, perlu direvisi, atau dicabut karena tidak lagi sesuai dengan ketentuan hukum terbaru.

Menurut Rizki, pembahasan tidak hanya menyangkut besaran tarif maupun ketentuan teknis yang diatur dalam perda. Aspek yang lebih mendasar adalah kesesuaian substansi regulasi dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukumnya. "Pendalamannya itu di Pansus," katanya, Jumat (6/11).

Sejumlah perda yang menjadi perhatian DPRD di antaranya Perda Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah. Selain itu, terdapat regulasi mengenai peningkatan pelayanan atas pemungutan pajak daerah, bantuan keuangan partai politik, serta wajib daftar perusahaan.

DPRD juga menyoroti aturan mengenai tarif jasa pemanduan dan penundaan kapal serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Rizki menjelaskan, perbedaan waktu penerbitan perda membuat sejumlah ketentuannya perlu ditinjau kembali. Sebab, perkembangan kebijakan dan regulasi di tingkat nasional dapat memengaruhi keberlakuan aturan yang sebelumnya menjadi dasar pembentukan perda. "Ini dari masing-masing peraturan, ini peraturan lama, 2005, 2008. Artinya peraturan kan berkembang menyesuaikan kondisi terkini, juga mengacu kepada peraturan perundangan di atasnya," ujarnya.

Ia menegaskan, hasil evaluasi akan menjadi dasar bagi DPRD untuk menentukan langkah terhadap masing-masing regulasi. Jika ditemukan ketentuan yang tidak lagi relevan atau bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, perda tersebut dapat dicabut atau disesuaikan. "Harus mengacu pada peraturan yang ada, makanya ini mau dicabut disesuaikan dengan peraturan yang relevan," pungkasnya. (CR-03/PAY)



Bupati Pandeglang, Dewi Setiani Poto bersama pengurus MUI Kabupaten Pandeglang.

Ulama dan Umaro Bersatu Membangun Pandeglang Lebih Baik

PANDEGLANG, BANPOS - Sinergi antara ulama dan umaro (pemerintah) menjadi salah satu kunci penting dalam mewujudkan Kabupaten Pandeglang, yang lebih baik, khususnya dalam membangun masyarakat yang religius, berkarakter, dan berakhlak mulia.

Komitmen tersebut terlihat dalam kegiatan silaturahmi Bupati Pandeglang, Raden Dewi Setiani, bersama jajaran dan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pandeglang, di ruang kerja Bupati, Jumat (6/11) lalu.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah langkah strategis untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan para ulama dalam memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Kabupaten Pandeglang.

Salah satu hal yang menjadi perhatian Bupati adalah pentingnya keterlibatan MUI dalam memberikan pembinaan keagamaan kepada para siswa di lingkungan sekolah.

Menurutnya, perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat membawa berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, generasi muda perlu dibekali pemahaman agama yang kuat agar mampu menyaring berbagai informasi dan pengaruh lingkungan.

"Kita ketahui bersama, saat ini kemajuan teknologi informasi begitu pesat. Dengan adanya pemahaman agama kepada anak-anak sekolah, diharapkan dapat menjadi benteng bagi mereka sehingga tidak terbawa arus globalisasi yang negatif," kata Dewi.

Ia berharap, melalui sinergi dengan MUI, pembinaan keagamaan di sekolah dapat semakin ditingkatkan. Dengan demikian, para siswa tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga mempunyai landasan moral, etika, dan akhlak yang baik.

"Ini adalah tugas kita semua, semoga dengan sinergi ini dapat membentuk siswa yang pintar, cerdas dan berahlakulkarimah," ujarnya.

Ketua MUI Kabupaten Pandeglang, KH. Tubagus Uuf Zaki Ghufron Ma'ani menyambut baik dan mendukung gagasan Bupati Pandeglang.

Menurutnya, MUI Kabupaten Pandeglang juga telah merencanakan kegiatan pembinaan keagamaan melalui program roadshow ke sejumlah sekolah dengan melibatkan jajaran MUI tingkat kecamatan.

"Kami menyambut baik harapan Ibu Bupati. Ke depan, MUI akan melakukan roadshow ke tiap sekolah melalui MUI kecamatan untuk memberikan pembinaan keagamaan kepada para siswa," katanya.

Ia berharap, kegiatan tersebut dapat menjadi bagian dari upaya bersama dalam membentuk generasi muda Pandeglang yang memiliki pemahaman agama yang baik, berakhlakul karimah, serta mampu menghadapi tantangan perkembangan zaman.

Ia menambahkan, jajarannya juga selain kepada Bupati Pandeglang, melakukan kunjungan silaturahmi juga ke DPRD dan Polres. Melalui silaturahmi ini, ia berharap hubungan harmonis antara ulama dan umaro di Kabupaten Pandeglang semakin kuat.

Dikatakannya, kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, Kepolisian dan para tokoh agama diharapkan tidak hanya memperkuat kehidupan keagamaan masyarakat, tetapi juga menjadi fondasi dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

"Ulama dan umaro memiliki peran masing-masing yang saling melengkapi. Dengan kebersamaan, komunikasi, dan komitmen yang kuat, berbagai program pembangunan di Kabupaten Pandeglang diharapkan dapat berjalan lebih optimal demi kemaslahatan masyarakat," pungkasnya.(DHERUS)

TAMBANG EMAS CIKOTOK RESAHKAN MURID DAN GURU SD

Sudah Berlangsung Lama Tanpa Izin

BAKSEL, BANPOS - Praktik penambangan emas tanpa izin (PETI) atau yang dikenal dengan istilah gurandil di Blok SDN 1 Cikotok, Desa Cikotok, Kecamatan Cibeber menjadi sorotan warga, lantaran lokasi penambangan disebut sangat berdekatan dengan bangunan sekolah dasar negeri.

Beberapa waktu lalu, sejumlah warga menyampaikan kekhawatiran praktik PETI di kawasan yang disebut-sebut sebagai zona larangan karena dapat menimbulkan risiko keselamatan siswa, tenaga pendidik, serta lingkungan sekolah.

Salah seorang warga berinisial AD mengungkapkan keprihatinannya terhadap aktivitas gurandil yang diduga melakukan penambangan emas di bawah atau di sekitar bangunan sekolah.

"Betul kang, saya juga tidak munafik. Saya memahami kegiatan PETI ini menjadi salah satu cara untuk menghidupi keluarga. Tetapi, tolong jangan di lokasi yang sudah dinyatakan zona merah. Kira-kira juga, itu kan di atasnya ada bangunan sekolah," ujar AD.

Menurutnya, persoalan tersebut bukan hanya berkaitan dengan aktivitas pertambangan, tetapi juga menyangkut keselamatan anak-anak yang setiap hari mengikuti kegiatan belajar mengajar.

AD menilai, kepentingan ekonomi jangka pendek semestinya tidak mengabaikan potensi bahaya, terlebih apabila kegiatan penambangan berlangsung sangat berdekatan dengan fasilitas pendidikan.

Ia juga menyebut, terdapat sejumlah lubang tambang emas yang diduga beroperasi tanpa izin di Blok SDN 1 Cikotok. Salah satunya merupakan lubang yang menurut keterangannya dikaitkan dengan seseorang yang juga tokoh dan diduga yang mengelolanya,

"Saya menduga itu dikelola salah seorang tokoh warga sana juga," ungkapnya.

Hingga berita ini diturunkan belum ada konfirmasi dengan pihak aparat hukum setempat.(WDO/RUS)

IPM Lebak Terendah se-Banten

Akademisi Soroti Persoalan Pendidikan dan Investasi

LEBAK, BANPOS - Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lebak masih menjadi yang terendah di Provinsi Banten. Meski mengalami peningkatan pada 2026, capaian tersebut dinilai belum cukup untuk mengejar ketertinggalan dari kabupaten/kota lainnya.

Akademisi Institut Kemandirian Nusantara (IKNUS), Agus Hiplunudin, menilai rendahnya IPM Lebak tidak bisa hanya dilihat dari angka statistik. Menurutnya, terdapat sejumlah persoalan mendasar yang perlu diperhatikan pemerintah daerah, terutama menyangkut pendidikan, kesejahteraan masyarakat, dan daya beli.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), IPM Kabupaten Lebak pada 2026 tercatat sebesar 70,20, meningkat dibandingkan 2025 yang berada di angka 69,24. Namun, capaian tersebut masih berada di bawah Kabupaten Pandeglang yang telah mencapai 72,72.

Agus menjelaskan, IPM setidaknya terdiri atas sejumlah komponen utama, yakni pendidikan, tingkat kesejahteraan, dan daya beli masyarakat yang berkaitan dengan kelayakan hidup.

Ia menilai, persoalan tersebut tidak cukup diukur melalui pendekatan kuantitatif atau angka statistik semata. Pemerintah juga perlu melihat faktor kualitatif, termasuk kondisi sosial dan budaya masyarakat yang turut memengaruhi capaian pembangunan manusia.

"Misalnya pengaruh budaya, kesadaran untuk berpendidikan bisa saja masih lemah sehingga mengakibatkan meledaknya angka putus sekolah yang berimbas pada turunnya indeks IPM. Namun, ini perlu dikaji lebih dalam," ujarnya, Sabtu (7/11).

Selain persoalan pendidikan, Agus juga menyoroti rendahnya investasi yang berpotensi mempersempit kesempatan kerja bagi masyarakat. Kondisi tersebut dapat memicu peningkatan pengangguran dan berdampak terhadap tingkat kesejahteraan warga.

"Begitu pula dengan nilai investasi yang rendah dapat mengakibatkan meledaknya jumlah pengangguran sehingga tingkat kesejahteraan menurun yang akan berdampak langsung pada menurunnya indeks IPM," katanya.

Menurut Agus, rendahnya IPM dapat dipandang sebagai cerminan belum optimalnya pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi di suatu daerah, termasuk Kabupaten Lebak.

Untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain, ia mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak agar lebih serius membuka ruang investasi yang sehat. Upaya tersebut dinilai penting untuk memperluas lapangan pekerjaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, peningkatan investasi juga perlu diikuti dengan kebijakan yang memastikan masyarakat lokal mendapatkan kesempatan untuk mengakses lapangan pekerjaan yang tersedia.

Di sektor pendidikan, Agus menilai Pemkab Lebak perlu memperkuat pembinaan masyarakat agar orang tua dan anak memiliki kesadaran serta komitmen untuk menempuh pendidikan lebih lama.

Selain itu, pemerataan infrastruktur pendidikan juga harus menjadi perhatian, mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah (MA).

"Tadi sudah dijelaskan bahwa paling tidak pemerintah daerah dapat melakukan tiga strategi untuk menaikkan IPM. Pertama, membuka ruang investasi sehingga lapangan kerja semakin luas dan pastikan dapat diakses oleh warga Lebak," jelasnya.

"Kedua, secara kultural perlunya agen-agen untuk menyampaikan pentingnya pendidikan untuk masa depan anak sehingga warga Lebak memiliki minat dan komitmen terhadap pendidikan itu sendiri," sambungnya.

Strategi ketiga, lanjut Agus, adalah pemerataan infrastruktur sekolah agar masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Lebak dapat lebih mudah mengakses fasilitas pendidikan.

Ia menilai, ketiga langkah tersebut perlu dijalankan secara beriringan agar peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Lebak dapat terus didorong.

Sementara itu di kesempatan lain, Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah, mengatakan, pemerintah daerah bersyukur atas peningkatan IPM yang terjadi dalam satu tahun terakhir. Menurutnya, kenaikan dari 69,24 poin pada 2025 menjadi 70,20 poin pada 2026 merupakan perkembangan yang cukup baik.

Ia menilai, peningkatan tersebut menunjukkan bahwa berbagai kebijakan pemerintah daerah di bidang pendidikan, kesehatan, serta pemulihan daya beli masyarakat mulai menunjukkan hasil.

"Kenaikan ini menegaskan bahwa intervensi kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemulihan daya beli masyarakat yang kita gulirkan bersama sudah berada di jalur yang benar (on the right track)," kata Amir.

Meski demikian, Amir mengakui bahwa peningkatan IPM Kabupaten Lebak masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya berkaitan dengan kondisi geografis wilayah yang cukup luas dan memiliki karakteristik berbeda-beda.

Menurutnya, Kabupaten Lebak memiliki 28 kecamatan dan 340 desa/kelurahan. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam pemerataan fasilitas kesehatan, sarana pendidikan, hingga akses ekonomi masyarakat.

"Menjangkau seluruh pelosok wilayah untuk memastikan fasilitas kesehatan, sarana pendidikan, serta akses ekonomi dasar merata hingga ke garis terdepan tentu memerlukan daya, waktu, dan strategi akselerasi yang bertahap," ujarnya.

Ia menjelaskan, karakteristik wilayah Kabupaten Lebak juga berbeda dengan daerah perkotaan. Sebagian wilayahnya merupakan kawasan hutan, daerah resapan air, dan perkebunan sehingga membutuhkan pendekatan pembangunan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah.

Selain persoalan geografis, Amir mengatakan, pemerintah daerah juga terus berupaya meningkatkan kualitas pembangunan manusia melalui sejumlah program strategis. Upaya tersebut di antaranya perbaikan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, penanganan stunting, serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.

Pemerintah daerah juga mendorong penataan kawasan perdesaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan mengoptimalkan potensi lokal, seperti sektor pertanian, pariwisata, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Amir menegaskan, pemerintah daerah tidak ingin hanya mengejar peningkatan angka IPM, tetapi juga memastikan kualitas pembangunan manusia dapat berlangsung secara berkelanjutan.

"Kita tidak ingin mengejar angka semata dengan jalan pintas. Yang sedang Pemerintah Kabupaten Lebak bangun adalah pembangunan manusia berbasis kualitas yang berkelanjutan," ungkapnya.

Terkait posisi IPM Kabupaten Lebak yang masih berada di urutan terbawah se-Provinsi Banten, Amir mengaku kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi sekaligus motivasi bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan.

"Apakah kita puas? Tentu tidak. Posisi IPM kita di Banten bukan alasan untuk berkecil hati, melainkan menjadi cambuk dan pemacu semangat bagi seluruh jajaran Pemkab Lebak untuk bekerja lebih keras, lebih kolaboratif, dan lebih inovatif," katanya.

Ia juga menyebut, pembangunan manusia merupakan investasi jangka panjang yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Perbaikan gizi anak, ketersediaan fasilitas kesehatan, serta pemenuhan akses pendidikan diharapkan dapat menjadi fondasi peningkatan IPM Kabupaten Lebak pada tahun-tahun mendatang.

"Pemerintah Daerah tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh dukungan, masukan konstruktif, serta kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat, termasuk anak-anak muda dan rekan-rekan media," pungkasnya.(TQS/RUS)





KEHILANGAN

Kehilangan 1 (satu) buku BPKB kendaraan R4 merk Toyota Type Camry 3,5 Q AT, Plat Nomor B 25 JOY. Nomor rangka : MR053KK40A9002293 Nomor Mesin : 2GR0750023 atas nama TAN IE CIAW nomor BPKB : H05465816

Kehilangan di kantor PT. BAJA PERKASA SENTOSA yang beralamat di Jl. Lanud Gorda KM 1, No. 9, Cikande, Kampung Maja, Kec. Kibin, Kabupaten Serang, Banten 42185

Atas nama pemilik BPKB TAN IE CIAW yang beralamat di jln pluit sakti 4/34 RT.005 RW.007 Kel. Pluit kec. Penjaringan Kota. Jakarta utara Prov. DKI Jakarta
HP 081399356786

HILANG BPKB, R4
NO. POL: A-257-K
NOKA: MHKF MR CEJ4K 001140
AN. PEMERINTAH DAERAH

HILANG BPKB, R4
NO POL: A-1473-KR
HOKA: MHKM1CB4JEK 036217
AN. H. SUKRÍ BIN SUWARTA (ALM).

HILANG BPKB, R4
NO.POL: A-9236-KB
HOKA: MHMF E 74 P5JK 184005
AN. Mahajana Cahaya Juwita

Tlh hilang 1 Unit BPKB Nopol A 1293 HL Merk Suzuki Thn 2003, No KA MHYESJ4103J095201, No Sin F10SID197771

Tlh hilang 1 unit BPKB Nopol A 1053 EA, Merk Toyota, No KA MHKE8FB3JKJ000397, No Sin 2NRF890966 Th 2019 No. BPKB P05549215H1

Tlh hilang 1 Unit BPKB Nopol B 4228 BVS Merk Yamaha Thn 2019 No Ka MH3SG4640KJ058554 No sin G3J8E0111887

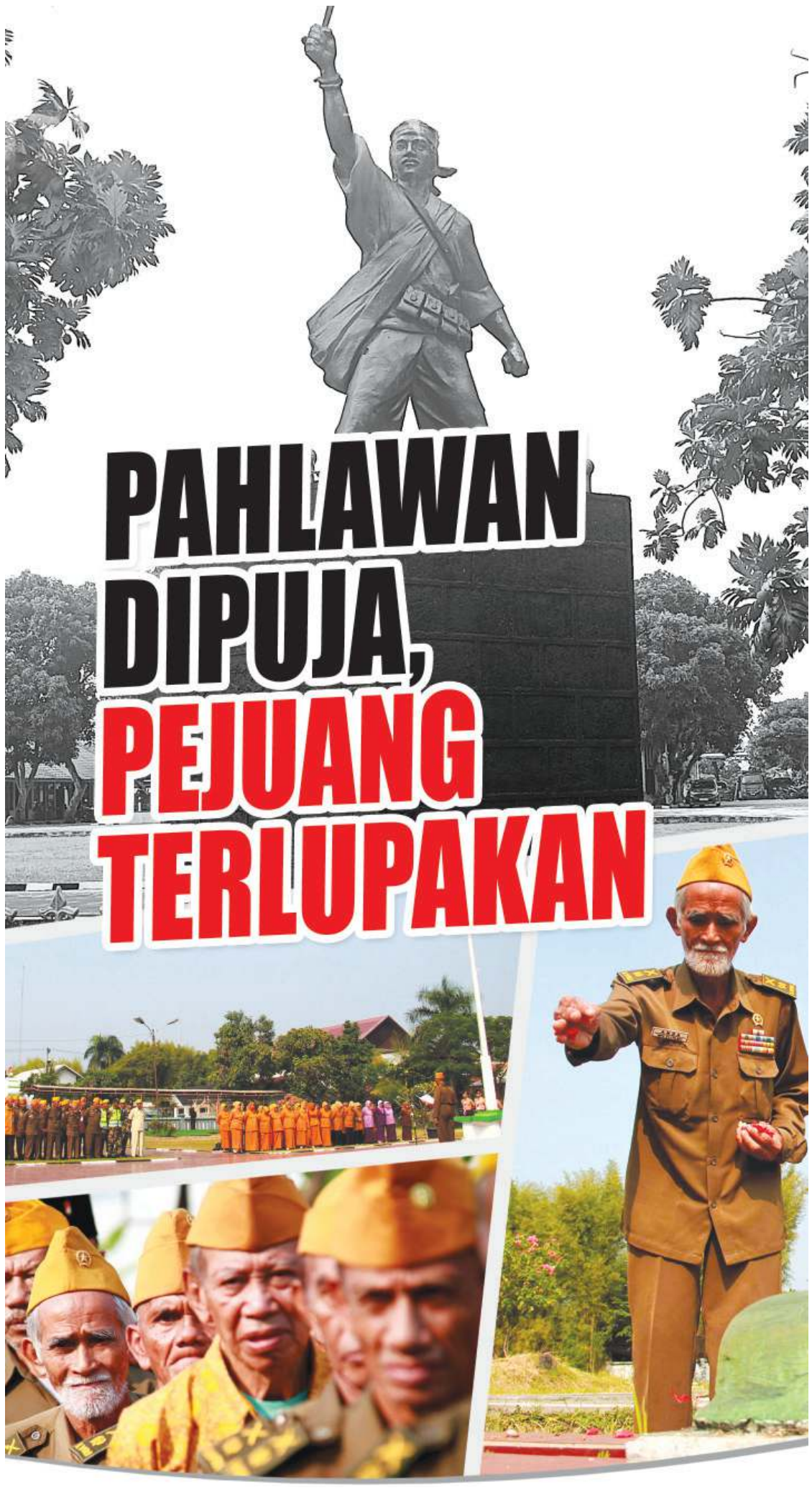
Telah Hilang Sertifikat HGB no. 28030119.3.00602, Ds. Jatimulya, Rangkasbitung, L. 3080 M2. An. PT Makmur Multy Mega Mandiri

Telah Hilang BPKP Mobil Suzuki Pick Up, Warna Hitam, No. Mesin: G15AID1094223, No. Rangka: MHYESL415HJ803622, No. Pol. B 9571 CAH, No. BPKP: N05408218. Tahun 2017, atas nama NURUDIN, Alamat: Batuceper RT.02/03 Batuceper Kota Tangerang

MAKANAN

Jual/menerima pesanan Bubur Ayam Cianjur dan Lontong Sayur. **alamat:** Lampu merah Perumahan Graha Asri, Ciracas, Kota Serang - Banten Hub: Jejen 0878 7346 4053

WEBSITE www.banpos.co | EMAIL iklanbantenpos@gmail.com | TWITTER @bantenpos | INSTAGRAM banten_pos | FACEBOOK facebookbantenpos | YOUTUBE Banpos Channel



PAHLAWAN DIPUJA, PEJUANG TERLUPAKAN

Setiap 10 November, pemerintah dan masyarakat memperingati Hari Pahlawan melalui upacara, tabur bunga, serta ziarah ke makam para pejuang kemerdekaan. Namun, di balik seremoni tahunan tersebut, masih terdapat persoalan mendasar yang belum sepenuhnya diselesaikan pemerintah daerah, yakni perhatian terhadap veteran, keluarga pejuang, dan para tokoh perjuangan yang jejak pengorbanannya belum banyak dikenal.

Di Provinsi Banten, penghormatan terhadap jasa pahlawan masih dihadapkan pada persoalan pendataan, keterbatasan bantuan, hingga belum meratanya perhatian pemerintah. Bahkan, sejumlah pemerintah daerah mengakui belum memiliki program khusus untuk membantu veteran yang mengalami kesulitan ekonomi.

Persoalan ini tidak hanya menyangkut mereka yang masih hidup. Sejumlah kisah perjuangan masyarakat di pelosok Banten juga belum mendapatkan perhatian yang sepadan. Nama-nama pejuang yang gugur dalam mempertahankan kemerdekaan masih banyak tersimpan dalam ingatan keluarga dan masyarakat, tanpa dokumentasi yang memadai.

Salah satunya adalah Salmin bin Argo, sosok pejuang asal Cadasari, Kabupaten Pandeglang, yang namanya diabadikan dalam sebuah patung di depan Kodim 0601/Pandeglang. Meski patungnya cukup dikenal masyarakat, tidak banyak warga yang mengetahui kisah perjuangan di balik sosok yang digambarkan menggenggam golok tersebut.

Anggota Koramil 02 Cadasari Kodim 0601/Pandeglang, Pelda Iwan Suryadi, yang menulis sejarah Salmin, menceritakan bahwa tokoh tersebut dikenal sebagai jawara yang memimpin perlawanan terhadap pasukan Belanda.

Menurut penuturan dalam tulisan sejarah yang disusunnya, Salmin bersama pasukannya berupaya menyerang markas Belanda yang lokasinya kini menjadi kompleks Kodim 0601/Pandeglang. Sebelum melakukan serangan, mereka berusaha menghancurkan pabrik penggilingan padi atau heller yang memasok kebutuhan logistik pasukan Belanda.

Perlawanan tersebut membuat pasukan Belanda di Pandeglang kewalahan. Namun, pihak Belanda kemudian meminta bantuan pasukan tambahan dari Rangkasbitung. Belanda juga mengerahkan pesawat tempur untuk menggempur wilayah Kadomas, termasuk lokasi pabrik padi tempat Salmin dan pasukannya berkumpul.

Salmin akhirnya gugur dalam pertempuran tersebut. Jenazahnya, menurut kisah yang dituturkan Iwan, baru ditemukan tiga hari kemudian dengan tujuh peluru masih bersarang di tubuhnya. Golok yang digunakan untuk bertempur disebut masih tergenggam di tangannya.

"Jadi, patung yang ada di depan Kodim 0601/Pandeglang itu adalah Bapak Salmin yang berjuang melawan Belanda hingga akhir hayatnya," kata Iwan kepada BANPOS.

Saat ini, Salmin dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Cihaseum, Kecamatan Pandeglang. Namun, identitas pada batu nisannya hanya tertulis Salmin Kadomas Pdg, tanpa keterangan tanggal lahir maupun wafat.

Kisah serupa juga ditemukan di Desa Suwakan, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Di wilayah tersebut terdapat kompleks makam yang dikenal sebagai Makam Sabilillah atau Makam Sabil. Masyarakat setempat meyakini belasan makam di lokasi itu merupakan tempat peristirahatan para pejuang yang gugur dalam perlawanan terhadap Belanda.

Mujahidin, salah seorang ahli waris pejuang bernama Madsuha alias Uweng, mengatakan kisah perjuangan tersebut masih diwariskan melalui cerita keluarga.

Menurut cerita yang diterimanya, peristiwa itu berkaitan dengan upaya Belanda merebut kembali tambang emas di kawasan Cikotok, khususnya Pasir Gombong. Pasukan Belanda disebut melintasi Kampung Suwakan sebelum menuju kawasan pertambangan.

Di tengah perjalanan, kendaraan pasukan Belanda dikisahkan dilempari granat oleh anggota Tentara Keamanan Rakyat (TKR) bersama warga yang bersembunyi di wilayah tersebut. Meski granat tidak meledak, peristiwa itu disebut membuat pasukan Belanda kocar-kacir.

Mujahidin menuturkan, Belanda kemudian kembali ke Suwakan bersama dua orang informan yang menurut cerita keluarga berasal dari Sukabumi. Keduanya disebut memberikan informasi mengenai keterlibatan kepala desa dan tokoh masyarakat dalam perlawanan.

Dalam catatan masyarakat yang dipublikasikan Saefullah D melalui media sosial, terdapat 13 nama yang disebut menjadi korban pembantaian tentara Belanda. Mereka adalah H Askam, Dulmatan, Letnan Usa Atmaja, Uci, Sarwono, Uceng, Sanan, Rasyid, Jahir, Tua Tohid, Madsuha, Sarmad, dan Ujum.

Catatan tersebut menyebut peristiwa berlangsung pada 2 Januari 1948. Para korban dikisahkan ditembak di sekitar Sungai Cimadur, kemudian jasadnya dibuang ke sungai sebelum dievakuasi masyarakat dan dimakamkan di kompleks Makam Sabilillah.

Namun, kronologi dan daftar nama tersebut masih membutuhkan penelitian serta verifikasi melalui sumber sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Mujahidin berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap makam tersebut agar tidak sekadar menjadi tempat pemakaman yang dikenal secara turun-temurun.

"Kami secara pribadi tidak minta apa pun dari pemerintah. Hanya kami minta pemerintah memperhatikan dan memelihara situs perjuangan itu. Termasuk membangun tugu pahlawan di sana," harapnya.

Veteran Belum Terdata

Di tengah kisah perjuangan yang diwariskan masyarakat tersebut, persoalan perhatian terhadap veteran yang masih hidup juga belum sepenuhnya terjawab. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten, Lukman, mengungkapkan bahwa pihaknya tidak memiliki data rinci mengenai jumlah veteran di seluruh wilayah Banten. Pendataan tersebut, menurutnya, tidak menjadi kewenangan langsung Dinsos provinsi maupun kabupaten/kota.

"Data tidak dalam penguasaan Dinsos, dari Dinsos kabupaten/kota juga tidak terlaporkan karena bukan kewenangan Dinas Sosial," ujarnya.

Ketiadaan data terintegrasi menjadi persoalan mendasar. Tanpa mengetahui jumlah, persebaran, serta kondisi sosial ekonomi veteran, pemerintah daerah akan kesulitan menyusun kebijakan perlindungan yang tepat sasaran.

Selama ini, Pemprov Banten mengaku hanya memberikan santunan kepada janda perintis kemerdekaan dan pejuang pembentukan Provinsi Banten.

Nilainya sebesar Rp1,5 juta per bulan. Namun, hingga 2026, penerimanya tinggal tiga orang.

"Santunan untuk janda perintis kemerdekaan sebesar Rp1.500.000 per bulan, sisa tiga orang sampai dengan 2026," jelas Lukman.

Sementara bagi veteran yang masih hidup tetapi mengalami kesulitan ekonomi, Pemprov Banten belum mempunyai skema bantuan khusus. Mereka hanya diarahkan untuk mengakses program bantuan sosial lansia apabila memenuhi persyaratan desil 1–4. "Bisa masuk ke penerima bansos lansia jika memungkinkan syarat dan ketentuan masuk ke desil 1–4," katanya.

Artinya, status sebagai veteran belum otomatis menjadi dasar untuk memperoleh perlindungan sosial khusus dari pemerintah daerah. Mereka harus mengikuti mekanisme bantuan sosial umum sebagaimana masyarakat lainnya.

Persoalan serupa ditemukan di Kota Serang. Dinas Sosial setempat mengakui belum memiliki program bantuan khusus bagi veteran yang mengalami kesulitan ekonomi pada 2026.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinsos Kota Serang, Eha Julaeha, mengatakan tahun ini tidak terdapat kegiatan khusus untuk veteran. Bahkan, anggaran kegiatan peringatan Hari Pahlawan juga tidak dialokasikan melalui bidangnya.

"Tidak ada program kegiatan khusus bagi veteran di tahun 2026. Di tahun 2026 juga tidak ada anggaran untuk kegiatan Hari Pahlawan," ungkapnya.

Ia menegaskan, pihaknya juga tidak memiliki program bantuan bagi veteran yang membutuhkan dukungan ekonomi.

"Tidak ada program bantuan di bidang kami untuk veteran yang kesulitan ekonomi," tegasnya.

Berbeda dengan Kota Serang, Pemkot Cilegon masih mengalokasikan bantuan penghargaan bagi veteran dan keluarga veteran pejuang kemerdekaan.

Berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor 800.1.12.8/Kep.221-Dinsos/2026, terdapat delapan penerima bantuan pada 2026. Penerima terdiri atas veteran aktif yang juga pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Cabang Cilegon, serta janda dan anak dari almarhum pejuang kemerdekaan.

Kepala Dinsos Kota Cilegon, Lia Nurlia Mahatma, menyebut bantuan penghargaan tersebut telah masuk perencanaan dan dijadwalkan direalisasikan pada November 2026. "Bantuan penghargaan berupa uang kepada veteran dan keluarga veteran pejuang pembela kemerdekaan RI ini sudah masuk dalam perencanaan dan dijadwalkan untuk direalisasikan pada bulan November 2026," ujarnya.

Meski demikian, data delapan penerima tersebut belum sertamerta menggambarkan keseluruhan kondisi veteran dan keluarga pejuang di Kota Cilegon. Pemetaan kebutuhan ekonomi seluruh veteran maupun keluarga yang belum masuk daftar penerima masih perlu diperjelas.



Lia Nurlia Mahatma

Persoalan lain yang muncul adalah pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Dinsos Banten menyatakan tidak memiliki program khusus untuk veteran karena urusan tersebut masuk dalam kewenangan kabupaten/kota. Sementara pemerintah kabupaten/kota juga belum seluruhnya memiliki program perlindungan khusus.

Kondisi tersebut memperlihatkan perlunya koordinasi lintas pemerintahan agar pembagian kewenangan tidak berujung pada kekosongan pelayanan.

Anggota DPRD Kota Cilegon, Qoidatul Sitta, mengingatkan agar pemerintah tidak hanya menghitung jumlah bantuan maupun pengaduan yang masuk, tetapi juga memastikan kebutuhan veteran dan keluarganya benar-benar teridentifikasi.

Menurutnya, pemerintah harus menelusuri persoalan pendataan veteran, akses bantuan, pelayanan administrasi, hingga perhatian terhadap kesejahteraan keluarga pejuang.

Ia juga meminta agar Hari Pahlawan tidak berhenti sebagai agenda seremonial.

"Intinya, Hari Pahlawan jangan sampai menjadi kegiatan seremonial tahunan. Pemerintah harus mampu membuktikan komitmennya melalui kebijakan, anggaran yang memadai, perlindungan terhadap veteran, serta pemeliharaan nyata terhadap makam, situs, dan peninggalan sejarah," tegasnya.

Persoalan kepahlawanan di Banten pada akhirnya bukan hanya tentang bagaimana pemerintah mengenang mereka yang telah gugur. Lebih dari itu, negara dituntut memastikan para veteran dan keluarga pejuang yang masih hidup memperoleh perhatian yang layak.

Sebab, penghormatan terhadap pahlawan tidak cukup diwujudkan melalui upacara dan tabur bunga. Penghormatan itu harus tercermin dalam kebijakan, perlindungan, dan kesediaan pemerintah merawat jejak perjuangan yang telah membentuk sejarah Banten.(CR03/DHE/MPD/MYU/ACG/WDO/ENK)

SEJARAH PERJUANGAN BANTEN TERANCAM HILANG

Banten memiliki perjalanan panjang dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mulai dari Geger Cilegon 1888 hingga revolusi fisik 1945, berbagai peristiwa dan tokoh telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa.

Namun, kekayaan sejarah tersebut belum sepenuhnya terdokumentasi. Arsip perjuangan masih tersebar di berbagai lembaga dan koleksi pribadi, sementara kisah para pejuang di tingkat desa banyak yang hanya tersimpan dalam ingatan masyarakat.

Di sisi lain, pendidikan sejarah lokal belum mendapatkan porsi yang memadai. Sejarah Banten di sekolah menengah belum menjadi mata pelajaran wajib tersendiri, sementara upaya pengenalan warisan sejarah masih bergantung pada kegiatan tematik dan program sosialisasi.

Kondisi tersebut memunculkan ancaman hilangnya ingatan kolektif masyarakat terhadap perjuangan para pendahulunya.

Kisah perjuangan masyarakat Desa Suwakan, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, menjadi salah satu gambaran persoalan tersebut.

Di wilayah selatan Banten itu terdapat kompleks makam yang dikenal sebagai Makam Sabilillah atau Makam Sabil. Masyarakat meyakini belasan makam di lokasi tersebut merupakan tempat peristirahatan para pejuang yang gugur dalam perlawanan terhadap Belanda.

Mujahidin, salah seorang ahli waris pejuang bernama Madsuha alias Uweng, mengatakan cerita perjuangan tersebut masih diwariskan melalui penuturan keluarga.

Menurut cerita yang diterimanya, peristiwa itu berkaitan dengan upaya Belanda merebut kembali tambang emas di kawasan Cikotok, khususnya Pasir Gombong.

Pasukan Belanda disebut datang melalui jalur Bayah dan melintasi Kampung Suwakan sebelum menuju kawasan pertambangan. Di tengah perjalanan, kendaraan pasukan Belanda dikisahkan dilempari granat oleh anggota TKR bersama warga yang bersembunyi di wilayah tersebut.

Mujahidin melanjutkan, setelah kejadian tersebut, Belanda kembali datang ke Kampung Suwakan bersama dua orang informan yang menurut cerita keluarga bernama Endi dan Dori, berasal dari Sukabumi.

Keduanya disebut memberikan informasi mengenai keterlibatan kepala desa dan tokoh masyarakat Suwakan dalam perlawanan terhadap Belanda.

Dalam catatan Saefullah D yang dipublikasikan melalui media sosialnya, terdapat 13 orang yang disebut menjadi korban pembantaian tentara Belanda. Mereka adalah H Askam, Dulmatan, Letnan Usa Atmaja, Uci, Sarwono, Uceng, Sanan, Rasyid, Jahir, Tua Tohid, Madsuha, Sarmad, dan Ujum.

Catatan tersebut mengisahkan para korban dipaksa keluar dari rumah dan dibariskan di pinggir Sungai Cimadur, dekat Masjid Al-Kautsar, sebelum ditembak tentara Belanda. Jasad mereka kemudian dibuang ke sungai.

Selain menimbulkan korban jiwa, serangan itu disebut mengakibatkan pembakaran 23 rumah warga, dua musala, 15 lumbung padi, dan tiga kandang kambing.

Setelah dievakuasi masyarakat, para korban kemudian dimakamkan di suatu tempat yang dikenal sebagai Makam Sabilillah.

Namun, sebagian besar kisah yang melatarbelakangi keberadaan makam tersebut masih membutuhkan penelitian dan dokumentasi lebih mendalam. Belum terdapat keterangan mengenai hasil penelitian sejarah resmi yang memverifikasi seluruh nama korban, kronologi, maupun rincian peristiwa tersebut.

Kondisi ini menjadi contoh bagaimana sejarah perjuangan masyarakat di tingkat lokal masih sangat bergantung pada cerita turun-temurun.

Belum Ada Pusat Dokumentasi Sejarah Terpadu

Aktivis dan pegiat budaya Uday Suhada menilai pendataan sejarah perjuangan di Banten sejauh ini masih berjalan secara parsial.

Belum tersedia satu sistem dokumentasi terpadu yang menghimpun arsip, biografi tokoh, peristiwa perjuangan, dan peninggalan sejarah dalam satu pusat data yang mudah diakses masyarakat.

"Banten belum memiliki satu database atau pusat dokumentasi sejarah perjuangan yang terpadu, digital, dan mudah diakses oleh publik maupun generasi muda. Banyak dokumen dan arsip masih tersebar di berbagai lembaga maupun koleksi pribadi," ungkap Uday.

Menurutnya, persoalan tersebut bukan hanya berkaitan dengan kelengkapan arsip, tetapi juga menyangkut siapa saja yang selama ini diakui dalam narasi sejarah perjuangan Banten.

Selama ini, dokumentasi sejarah cenderung menonjolkan tokoh-tokoh besar yang telah dikenal secara nasional. Padahal, perjuangan kemerdekaan juga melibatkan ulama kampung, jawara, petani, buruh, pendidik, wartawan, dan pemuda di berbagai pelosok daerah.

"Selama ini narasi sejarah kita cenderung berfokus pada tokoh-tokoh besar atau berskala nasional. Padahal, pergerakan kemerdekaan di Banten juga digerakkan oleh jaringan ulama kampung, jawara, petani, dan pemuda di tingkat desa," ujarnya.

Ia mengingatkan, sejumlah kisah perjuangan masyarakat di Banten Selatan, Pandeglang, dan Lebak masih bertahan dalam tradisi lisan. Jika tidak segera diteliti, dibukukan, dan didigitalisasi, kisah tersebut berisiko hilang seiring berkurangnya generasi yang mengetahui sejarahnya.

Kisah para pejuang Suwakan menjadi salah satu gambaran

MAKAM PAHLAWAN RUSAK, ANGGARAN PEMELIHARAAN TERBATAS

Makam dan situs sejarah merupakan bagian penting dari bukti perjalanan perjuangan bangsa. Namun, upaya merawat peninggalan tersebut di Provinsi Banten masih menghadapi persoalan serius, mulai dari keterbatasan anggaran, belum tuntasnya penetapan cagar budaya, hingga lemahnya pemeliharaan fisik di lapangan.

Kondisi itu terlihat di Taman Makam Pahlawan (TMP) Cihaseum, Kabupaten Pandeglang. Sejumlah fasilitas di kompleks pemakaman tersebut mengalami kerusakan. Keramik di sekitar monumen retak, pagar tembok pembatas miring dan ditopang kayu, sementara instalasi lampu taman terlihat terbuka.

Kondisi tersebut ditemukan BANPOS saat melakukan penelusuran langsung ke TMP Cihaseum. Di area menuju monumen, terdapat enam lampu taman dengan kabel yang terlihat di bagian luar. Salah satu penutup lampu juga mengalami kerusakan.

Di sisi lain, pagar tembok pembatas taman makam terlihat miring dan berpotensi roboh. Untuk mencegahnya ambruk, bagian pagar tersebut ditopang menggunakan kayu.

Seorang petugas kebersihan TMP Cihaseum yang tidak ingin disebutkan namanya mengaku mengetahui kerusakan tersebut. Namun, ia tidak dapat melakukan perbaikan karena kewenangan pemeliharaan berada pada Dinas Sosial.

"Saya hanya petugas kebersihan, kondisi itu sudah lama bahkan untuk pagar tembok pembatas itu saya ganjal pakai kayu agar tidak roboh. Untuk lampu itu digunakan setahun sekali saja ketika akan ada peringatan Hari Pahlawan, renungan suci atau Hari Ulang Tahun Kabupaten Pandeglang," katanya.

Kasubag Tata Usaha Dinsos Kabupaten Pandeglang, Muhammad Dahlani, mengatakan TMP Cihaseum memiliki 113 makam. Pengelolaan yang dilakukan pihaknya terbatas pada kompleks pemakaman tersebut.

"Jumlahnya 113 makam. Kita hanya mengelola Taman Makam Pahlawan (TMP) Cihaseum saja," kata Dahlani kepada BANPOS.

Ia menjelaskan, anggaran pemeliharaan makam dan monumen pada 2026 sebesar Rp15 juta.

"Anggaran untuk tahun 2026 sebesar Rp15 juta. Untuk pelestarian situs sejarah kalau di kita nggak ada, kalau situs budaya mungkin kalau tidak salah di Disparbud. Kalau Dinsos hanya pemeliharaan TMP Cihaseum, sifatnya K3, kebersihan dan mengecat, pengadaan karangan bunga, tabur bunga," jelasnya.

Menurut Dahlani, realisasi anggaran pemeliharaan tersebut hampir mencapai 100 persen karena agenda terakhir yang dilaksanakan adalah peringatan Hari Pahlawan.

Namun, tingginya realisasi anggaran tidak serta-merta menjawab seluruh kebutuhan perawatan fasilitas di kompleks pemakaman.

Dahlani mengakui, lampu dan kabel instalasi listrik di TMP Cihaseum kerap hilang. Akibatnya, pihaknya harus kembali membeli perlengkapan setiap kali akan menggelar kegiatan.

"Jadi setiap ada agenda renungan suci malam, karena itu tempatnya umum kita setiap acara selalu beli lampu karena pada hilang. Bahkan kabel instalasi listriknya juga sering hilang, jadi akhirnya setiap ada agenda itu selalu beli yang baru. Tiang lampu pun ada yang ngambil, kita tidak bisa menyalahkan siapapun karena memang itu tidak dikunci. Kalau meterannya ada, kita yang bayar," terangnya.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa pemeliharaan TMP tidak hanya membutuhkan anggaran kebersihan dan pengecatan, tetapi juga pengamanan aset serta perawatan fasilitas secara berkelanjutan.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pandeglang, TB Udi Juhdi, mengatakan pihaknya telah mendorong organisasi perangkat daerah terkait agar melakukan perencanaan pemeliharaan yang lebih terukur.

Berkaitan dengan kondisi TMP Cihaseum, DPRD masih menunggu penghitungan kebutuhan teknis dari Dinsos untuk menjadi bahan pembahasan APBD 2027.

"Sebetulnya kami mendorong OPD terkait melakukan perencanaan yang terukur. Untuk pemeliharaan TMP nilainya kami masih menunggu dari Dinsos, menghitung secara teknis mumpung APBD 2027 belum disahkan masih dalam tahap pembahasan. Sebelum finalisasi, ini masih kita tunggu angkanya," terangnya.

TB Udi juga mendorong Disparbud Kabupaten Pandeglang untuk menginventarisasi cagar budaya dan mengangarkan penataan serta promosi agar situs bersejarah dapat terawat dan dikenal masyarakat.

Persoalan pemeliharaan situs sejarah juga terlihat di Desa Suwakan, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Di desa tersebut terdapat kompleks makam yang dikenal sebagai Makam Sabilillah atau Makam Sabil.

Lokasi itu diyakini masyarakat sebagai tempat peristirahatan belasan pejuang yang gugur dalam perlawanan terhadap Belanda. Setiap 10 November, masyarakat menggelar tawasulan dan zikir untuk mengenang para pejuang yang dimakamkan di sana.

Mujahidin, salah seorang ahli waris pejuang bernama Madsuha alias Uweng, berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap kompleks makam tersebut.

"Kami secara pribadi tidak minta apa pun dari pemerintah. Hanya kami minta pemerintah memperhatikan dan memelihara situs perjuangan itu. Termasuk membangun tugu pahlawan di sana," harapnya.

Namun, dalam bahan yang dihimpun BANPOS belum terdapat keterangan mengenai penetapan resmi Makam Sabilillah sebagai cagar budaya maupun program khusus pemerintah untuk melindungi dan mengembangkan kawasan tersebut.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa peninggalan sejarah di daerah tidak selalu berada dalam kompleks yang sudah dikelola pemerintah. Sebagian justru berada di lingkungan permukiman dan bergantung pada kepedulian keluarga serta masyarakat setempat.

Ratusan Objek Belum Ditetapkan

Persoalan Makam Sabilillah merupakan bagian dari tantangan lebih luas dalam pelestarian peninggalan sejarah di Provinsi Banten.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten per 27 Oktober 2026, terdapat 56 cagar budaya yang telah memperoleh penetapan resmi. Rinciannya, dua objek berperingkat nasional, sembilan objek berperingkat provinsi, dan 45 objek berperingkat kabupaten/kota.

Di luar objek yang telah ditetapkan, masih terdapat 503 Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) yang tersebar di berbagai kabupaten/kota.

Kepala Bidang Kebudayaan Dindikbud Banten, Rohaendi, mengakui keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala dalam upaya pelestarian tersebut.

"Kalau bicara anggaran, itu sangat kecil," ujarnya.

Menurut Rohaendi, proses penetapan cagar budaya juga menghadapi kendala ketika objek yang diduga memiliki nilai sejarah sudah menjadi milik pribadi. Salah satu persyaratan mendasar adalah persetujuan pemilik untuk menjaga objek tersebut setelah ditetapkan.

"Yang paling sulit untuk diidentifikasi dan ditetapkan adalah ketika objek diduga cagar budaya ini sudah menjadi milik pribadi. Karena salah satu syarat lampiran paling dasar adalah persetujuan dan kesiapan pemilik bahwa bangunan tersebut dijaga setelah ditetapkan," paparnya.

Persoalan kepemilikan memperlihatkan bahwa penyelamatan warisan sejarah tidak cukup hanya dengan inventarisasi. Pemerintah juga perlu membangun kesepahaman dengan pemilik agar objek yang memiliki nilai sejarah tidak kehilangan bentuk maupun fungsinya.

Keterbatasan anggaran juga terlihat di Kota Serang. Berdasarkan data Dindikbud Kota Serang, anggaran pelestarian cagar budaya mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir.

Pada 2024, anggaran tercatat sebesar Rp141,2 juta. Jumlah tersebut turun menjadi Rp92,1 juta pada 2025, kemudian kembali turun menjadi sekitar Rp60,5 juta pada 2026. Artinya, dalam kurun waktu dua tahun, alokasi anggaran pelestarian cagar budaya menyusut lebih dari separuh dibandingkan anggaran 2024.

Kepala Bidang Kebudayaan Dindikbud Kota Serang, Ratu Anita Taurina, menyebut realisasi anggaran pelestarian selama periode tersebut mencapai sekitar 94 persen. Namun, tingginya realisasi anggaran tidak serta-merta menjawab persoalan kebutuhan pemeliharaan seluruh objek sejarah yang tersebar di wilayah Kota Serang.

Saat ini, terdapat 13 cagar budaya yang telah ditetapkan melalui SK Walikota Serang. Tiga objek lainnya masih dalam proses di Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Di sisi lain, terdapat 62 ODCB berupa struktur, bangunan, dan situs atau lokasi yang belum ditetapkan. Jika memasukkan 3.610 benda yang juga masuk kategori ODCB, jumlahnya mencapai 3.682 objek.

Salah satu objek yang menjadi perhatian adalah reruntuhan Masjid Koja di Kecamatan Kasemen. "Setidaknya ada satu yang mengalami kerusakan atau keterancaman tinggi, yaitu reruntuhan Masjid Koja di Kecamatan Kasemen," ungkap Ratu Anita.

Pemeliharaan Justru Tidak Dianggarkan

Persoalan anggaran juga terlihat dalam perencanaan Pemkot Serang pada 2025–2026. Kepala Bapperida Kota Serang, Warso Hari Pamungkas, mengungkapkan adanya perubahan alokasi pada sejumlah subkegiatan yang berkaitan dengan pelestarian sejarah.

Pada sektor kebudayaan, anggaran penetapan cagar budaya meningkat dari Rp43,34 juta pada 2025 menjadi Rp60,53 juta pada 2026. Namun, anggaran pengembangan cagar budaya sebesar Rp48,79 juta pada 2025 tidak lagi dialokasikan pada 2026.

Sementara pada sektor pengelolaan TMP, anggaran rehabilitasi sarana dan prasarana meningkat dari Rp29,79 juta pada 2025 menjadi Rp598,61 juta pada 2026.

Akan tetapi, anggaran pemeliharaan dan pengamanan TMP yang sebelumnya masing-masing sebesar Rp33,70 juta dan Rp18,80 juta pada 2025 tidak tercantum dalam alokasi 2026.

Perubahan tersebut menjadi catatan penting dalam evaluasi kebijakan pelestarian sejarah. Sebab, rehabilitasi fasilitas tidak selalu identik dengan keberlanjutan pemeliharaan.

Bangunan yang telah direhabilitasi tetap membutuhkan perawatan rutin, pengamanan, serta pengawasan agar kondisinya tidak kembali mengalami kerusakan.

Di tingkat Provinsi Banten, persoalan kewenangan aset juga menjadi penghambat. Dinsos Banten menyatakan tidak dapat mengalokasikan anggaran pemeliharaan fisik untuk TMP di wilayahnya karena aset tersebut merupakan milik pemerintah kota.

Kondisi ini memperlihatkan pentingnya sinkronisasi antara kepemilikan aset, kewenangan pengelolaan, dan tanggung jawab pembiayaan.

Guru Besar Ilmu Sejarah Pemikiran Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Prof. Mufti Ali, menilai perhatian pemerintah terhadap pelestarian sejarah masih relatif minim. Ia menyoroti sejumlah situs bersejarah yang mengalami perubahan fungsi akibat rehabilitasi bangunan, perluasan jalan, maupun pembangunan sarana lainnya.

"Banyak situs yang mengalami perubahan dan fungsi. Misalnya di Kota Serang sendiri, situs-situs bersejarah sebagian sudah berubah fungsi. Sebagian besar karena mungkin alasan rehabilitasi bangunan dan perluasan jalan, serta perluasan sarana-sarana yang lain," ungkapnya.

Aktivis dan pegiat budaya Uday Suhada juga menilai sejumlah situs sejarah di Banten mengalami alih fungsi, terbengkalai, bahkan rusak akibat desakan pembangunan dan industrialisasi. Ia mendorong pemerintah daerah menyusun masterplan penyelamatan sejarah Banten melalui audit dan inventarisasi menyeluruh terhadap situs, makam, serta dokumen sejarah perjuangan.

Anggota DPRD Kota Cilegon, Qoidatul Sitta, mengingatkan bahwa pengawasan terhadap anggaran pelestarian cagar budaya dan makam pahlawan tidak boleh hanya berorientasi pada serapan anggaran.

"Yang perlu dipastikan itu apakah terdapat pemeriksaan atau audit yang secara khusus menyoroti anggaran pelestarian cagar budaya dan makam pahlawan, ataukah pemeriksaannya masih menjadi bagian dari pemeriksaan umum terhadap perangkat daerah," ujarnya.

Ia meminta pemerintah menelusuri kesesuaian antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban kegiatan.

"Serapan anggaran yang tinggi belum tentu menunjukkan keberhasilan apabila kondisi fisik situs atau makam tetap tidak terawat," tegasnya.(CR03/DHE/MPD/MYU/ACG/WDO/ENK)

---

persoalan tersebut. Nama-nama korban, kronologi peristiwa, dan kisah perlawanan masih banyak diketahui melalui cerita keluarga serta catatan masyarakat.

Tanpa penelitian dan dokumentasi yang sistematis, sejarah perjuangan di tingkat desa berisiko tidak pernah masuk ke dalam catatan sejarah daerah yang lebih luas.

Tokoh Perjuangan Belum Terdokumentasi Lengkap

Guru Besar Ilmu Sejarah Pemikiran Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Prof. Mufti Ali, juga menilai pendataan sejarah perjuangan kemerdekaan di Banten masih jauh dari lengkap.

Menurutnya, perhatian terhadap tokoh perjuangan selama ini masih didominasi sejumlah nama besar. Padahal, kemerdekaan merupakan hasil perjuangan berbagai kelompok masyarakat.

Dua tokoh yang tengah diusulkan menjadi Pahlawan Nasional dari masa Revolusi Kemerdekaan, yakni KH Achmad Khatib dan KH Syam'un, memang telah memiliki biografi perjuangan yang disusun. Namun, masih banyak tokoh lain yang belum memperoleh dokumentasi serupa.

"Pendataan sejarah perjuangan kemerdekaan di Banten tentu saja masih jauh dari kata lengkap. Perjuangan kemerdekaan itu kan tidak hanya dilakukan oleh dua tokoh itu dan tidak hanya dilakukan oleh kalangan ulama, kalangan pendidik, tapi juga dari berbagai kalangan," ujarnya.

Mufti Ali menilai diperlukan penyusunan ensiklopedia perjuangan kemerdekaan yang mampu menghimpun rekam jejak para pejuang dari berbagai latar belakang.

Upaya tersebut membutuhkan penelusuran sumber, pengumpulan arsip, serta penelitian terhadap jejak perjuangan para tokoh.

Dengan dokumentasi yang lebih lengkap, sejarah perjuangan tidak hanya menjadi milik segelintir tokoh yang telah dikenal, tetapi juga merekam kontribusi masyarakat di tingkat akar rumput.



Uday Suhada



Prof. Mufti Ali

Kisah di Suwakan, misalnya, dapat menjadi salah satu materi yang diteliti lebih lanjut melalui penelusuran arsip, dokumen keluarga, kesaksian ahli waris, serta sumber sejarah lainnya.

Sejarah Banten Belum Menjadi Mata Pelajaran Tersendiri

Persoalan berikutnya adalah lemahnya transmisi sejarah lokal kepada generasi muda melalui pendidikan formal.

Kepala Bidang Kebudayaan Dindikbud Provinsi Banten, Rohaendi, mengakui materi sejarah Banten belum menjadi mata pelajaran wajib tersendiri di tingkat SMA/SMK.

Pengenalannya selama ini dilakukan melalui pendekatan tematik dan kegiatan ekstrakurikuler.

"Secara khusus di SMA/SMK belum ada. Tapi kalau di perguruan tinggi itu ada mata kuliah Kebantenan," katanya.

Dindikbud Banten selama ini berupaya memperkenalkan sejarah daerah melalui pameran temporer, sosialisasi publik, kuliah umum, hingga pembagian buku sejarah.

Di lingkungan sekolah, materi sejarah Banten disisipkan melalui mata pelajaran lain seperti Bahasa Indonesia dan seni budaya, serta berbagai kegiatan perlombaan.

Sementara itu, di tingkat perguruan tinggi, sejarah lokal Banten telah mendapatkan ruang melalui mata kuliah Kebantenan.

Mufti Ali menilai porsi sejarah lokal dalam buku ajar pendidikan dasar hingga menengah masih perlu diperkuat. "Sejarah lokal memang perlu dimasukkan dalam buku ajar untuk pelajar SD, SMP, dan SLTA. Porsinya memang masih minim, masih sedikit," katanya.

Menurutnya, pengenalan sejarah daerah bukan sekadar menambah pengetahuan mengenai tahun dan nama tokoh. Lebih dari itu, sejarah dapat membentuk identitas, karakter, dan kesadaran generasi muda terhadap daerahnya.

Ratusan Objek Diduga Cagar Budaya Belum Ditetapkan

Lemahnya dokumentasi sejarah juga berkaitan dengan belum tuntasnya pendataan dan perlindungan peninggalan sejarah.

Dindikbud Banten mencatat terdapat 503 objek diduga cagar budaya yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota. Sementara itu, baru 56 cagar budaya yang telah mendapatkan penetapan resmi berdasarkan data per 27 Oktober 2026.

Di Kota Serang, jumlah objek yang belum ditetapkan mencapai 3.682 apabila menghitung struktur, bangunan, situs, lokasi, dan benda-benda yang masuk kategori ODCB.

Kepala Bidang Kebudayaan Dindikbud Kota Serang, Ratu Anita Taurina, menyebut terdapat 62 ODCB berupa struktur, bangunan, dan situs atau lokasi. Selain itu, terdapat 3.610 benda yang juga masuk kategori ODCB.

Besarnya jumlah objek tersebut memperlihatkan bahwa pekerjaan inventarisasi dan dokumentasi sejarah masih membutuhkan perhatian serius.

Uday Suhada menilai pendataan harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak berhenti pada pencatatan administratif.

Pemerintah perlu membangun sistem dokumentasi yang dapat menghimpun arsip, foto, naskah, biografi tokoh, serta berbagai kesaksian sejarah masyarakat.

Digitalisasi menjadi penting agar dokumen yang selama ini tersimpan di lembaga maupun koleksi pribadi dapat diakses dan dipelajari generasi berikutnya.

Dindikbud Banten mengaku terus melakukan berbagai kegiatan untuk memperkenalkan sejarah dan peninggalan budaya kepada masyarakat. Program tersebut antara lain melalui pameran, kuliah umum, sosialisasi, serta pembagian buku sejarah.

Di Kota Serang, Dindikbud juga menjalankan program Merajut Sejarah dan JAWARA MUDA atau Jelajah Warisan Sejarah, Budaya, dan Museum.

Program Merajut Sejarah dilakukan melalui pemutaran film bertema sejarah dan budaya. Sementara JAWARA MUDA menggunakan pendekatan walking tour history dengan mengajak peserta mengenal sejarah secara langsung melalui perjalanan lapangan menggunakan Bus Tubagus.

Meski demikian, kegiatan tersebut belum menjawab seluruh persoalan dokumentasi sejarah, terutama mengenai keberadaan pusat data terpadu dan integrasi materi sejarah lokal ke dalam pendidikan formal.

Sebab, kegiatan sosialisasi yang bersifat periodik memiliki jangkauan berbeda dengan sistem pendidikan dan dokumentasi yang berlangsung secara berkelanjutan.

Upaya penyelamatan sejarah juga membutuhkan keterlibatan lembaga yang memiliki tugas dalam pelestarian kebudayaan.

Namun, upaya BANPOS meminta penjelasan lebih lanjut kepada Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Banten, Swedhi Hananta, mengenai perlindungan, pendataan, dan penanganan situs sejarah yang terancam kerusakan belum memperoleh tanggapan substantif.

Hingga berita ini disusun, belum ada jawaban atas pertanyaan yang disampaikan BANPOS mengenai langkah konkret lembaga tersebut dalam mengintegrasikan dokumentasi, melindungi situs yang terancam, serta menyelamatkan arsip sejarah di Banten.

Amnesia Sejarah Mengancam Identitas Urang Banten

Uday Suhada mengingatkan, lemahnya dokumentasi dan pendidikan sejarah dapat menyebabkan masyarakat kehilangan identitas daerahnya. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai amnesia sejarah.

"Konsekuensi jika makam dan situs sejarah tidak dirawat adalah terjadinya amnesia sejarah. Kita bisa kehilangan identitas dan karakter urang Banten. Makam pejuang dan situs sejarah bukan sekadar tumpukan batu atau tanah, melainkan bukti otentik, jangkar moral, dan kompas arah bangsa," paparnya.

Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah menyusun masterplan penyelamatan sejarah Banten.

Langkah tersebut perlu diawali dengan audit dan inventarisasi menyeluruh terhadap situs, makam, serta dokumen sejarah perjuangan. Selanjutnya, dilakukan digitalisasi agar masyarakat dapat mengakses dan mempelajarinya.

Pemerintah juga perlu memperkuat regulasi, menyediakan anggaran penelitian, serta membangun kolaborasi dengan akademisi, budayawan, komunitas sejarah, masyarakat, dan sektor swasta.

Mufti Ali juga mengingatkan generasi muda agar mulai mengenali asal-usul dan peninggalan sejarah daerahnya. "Kalau kamu ngaku orang Banten, kamu harus tahu sejarah Banten. Lihat cagar budayanya, ikut memelihara, menyebarkan informasinya, serta menjaga dan memanfaatkannya," pesannya.

Kisah para pejuang Suwakan dan Salmin di Pandeglang memperlihatkan bahwa sejarah perjuangan Banten tidak hanya tersimpan dalam buku sejarah nasional, monumen besar, atau nama-nama tokoh yang telah dikenal luas.

Ada pula kisah masyarakat di pelosok daerah yang jejak perjuangannya masih hidup melalui makam, cerita keluarga, dan tradisi ziarah.

Tantangan pemerintah bukan hanya menjaga peninggalan fisik, melainkan juga menyelamatkan kisah di balik peninggalan tersebut agar tidak hilang bersama generasi yang masih mengingatnya.

Jika tidak segera dibenahi, generasi mendatang berisiko mewarisi nama-nama tokoh dan peristiwa sejarah tanpa pernah benar-benar mengenal perjuangan masyarakat yang membentuk Banten seperti sekarang.(CR03/DHE/MPD/MYU/ACG/WDO/ENK)

Pusat Berburu Pajak, UMKM Terdampak

Pemda Kena Imbas?

Penulis : TAUFIQ SOLEHUDIN
Editor : CHANDRA MAGGA

PEMERINTAH pusat tampaknya telah kehabisan cara dalam upaya menambal sulam kas negara. Hal itu tergambarkan dari ide gagasan pemberlakuan pajak pertambahan nilai (PPN) 11 persen terhadap pelaku UMKM.

Ide gagasan tersebut disampaikan oleh Utusan Kepresidenan RI Bidang Iklim dan Energi, Hasjim Djojohadikusumo, dalam acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) KADIN Indonesia pada 29 Oktober 2026 lalu. Dalam acara tersebut dia mengatakan, lembaga keuangan internasional - IMF dan Bank Dunia - mencatat ada sekitar 30 sampai 40 persen kegiatan ekonomi di Indonesia tidak tercatat. Artinya, Indonesia kehilangan potensi pendapatan sebesar Rp10 ribu triliun dari kegiatan ekonomi tersebut.

Melihat data tersebut, Hasjim menilai sebenarnya ekonomi Indonesia cukup besar. Bahkan, layak masuk dalam daftar 12 negara dengan ekonomi terbesar di dunia.

"Ekonomi kita 30 sampai 40 persen tidak tercatat. Itu berarti ada kurang lebih Rp10 ribu triliun yang tidak tercatat. Berarti apa? Sesungguhnya ekonomi Indonesia bukan 16 terbesar di dunia, melainkan 12 atau 11 ekonomi terbesar di dunia," katanya sebagaimana dikutip BANPOS dari akun YouTube KADIN Indonesia pada Jumat (7/11).

Untuk menjelaskan bagaimana transaksi ekonomi yang tidak tercatat tersebut terjadi, Hasjim memberikan sejumlah contoh sederhana. Dia menceritakan aktivitas jasa yang berlangsung di lingkungan tempat tinggalnya, mulai dari tukang cukur hingga tukang pijat yang menerima pembayaran tanpa memberikan kuitansi.

Menurutnya, transaksi semacam itu bukan hanya terjadi dalam aktivitas jasa perorangan. Praktik serupa juga berlangsung di berbagai sektor usaha, seperti warung tegal (Warteg) hingga salon kecantikan.

"Berarti apa? Ternyata ada jutaan transaksi seperti dilakukan oleh Anton dan Yanti kali ratusan juta dan sebagian-sebagian jumlahnya, termasuk mungkin Warung Tegal atau beauty salon, tidak ada semua transaksi itu berupa tunai," ujarnya.

Hasjim menyebut, jika transaksi-transaksi tersebut diakumulasikan, nilainya bisa mencapai angka yang sangat besar. Dia mengacu pada perkiraan Bank Dunia yang menyebut sekitar Rp10 ribu triliun aktivitas ekonomi Indonesia belum tercatat.

Namun, menurut Hasjim, besarnya potensi ekonomi tersebut belum sejalan dengan kemampuan negara dalam menghimpun penerimaan. Dia bahkan menyebut penerimaan negara Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan sejumlah negara lain.

"The bad news adalah seharusnya negara kita super kaya dan super kuat. Kita seharusnya G12, tetapi karena terus terang saja aparat kita selama ini agak lemah, penerimaan negara baik dari yang tercatat maupun tidak tercatat tidak dipungut maka kita lemah," katanya.

Dia kemudian menyinggung persoalan fiskal pemerintah yang kerap menjadi sorotan, termasuk kemampuan membiayai berbagai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes).

Padahal, Hasjim menilai, Indonesia memiliki ruang untuk meningkatkan penerimaan negara apabila pemungutan pajak dilakukan secara optimal sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dia mengungkapkan, saat ini total penerimaan negara yang berasal dari pajak, cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) baru berada di kisaran 12 persen dari produk domestik bruto (PDB) tercatat.

Angka tersebut, menurutnya, masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara lain. Hasjim mencontohkan Kamboja yang memiliki rasio penerimaan negara sebesar 18 persen, India 20 persen, serta sejumlah negara di Afrika yang mencapai 16 persen.

Hasjim lantas membandingkan rasio penerimaan Indonesia dengan Kamboja. Dia menilai, selisih enam persen tersebut seharusnya bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk menambah penerimaan negara hingga Rp1.500 triliun setiap tahun.

"Kalau kita bandingkan dengan Kamboja, negara lebih miskin dari Indonesia, selisihnya antara 18 persen dan 12 persen itu adalah enam persen. Enam persen dari yang tercatat adalah Rp25 ribu triliun. Enam persennya itu berapa? Rp1.500 triliun, bukan? Itu yang seharusnya kita terima tiap tahun tambahan Rp1.500 triliun," ujarnya.

Dia bahkan menilai, apabila penerimaan negara Indonesia mampu menyamai Kamboja, persoalan defisit anggaran yang selama ini dihadapi pemerintah dapat diatasi.

"Nah, defisit APBN kita sekitar Rp500 triliun kalau tidak salah. Kalau aparat kita pajak dan bea cukai bekerja semestinya, seharusnya seperti orang Kamboja kita surplus tahun ini Rp900 triliun, betul?" katanya.

Lebih lanjut, Hasjim menyebut pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyiapkan sejumlah langkah untuk meningkatkan penerimaan negara. Salah satunya melalui pemanfaatan teknologi elektronik, kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), serta sistem digital dalam proses pemungutan pajak.

Menurutnya, penggunaan teknologi tersebut diharapkan mampu mengidentifikasi transaksi ekonomi yang selama ini belum tercatat sekaligus memastikan kewajiban perpajakan dijalankan sesuai peraturan yang berlaku.

"Pemerintah Prabowo-Gibran sudah ambil langkah-langkah untuk menanggulangi masalah ini dan Perpres sudah keluar. Yang akan dilakukan adalah pajak lewat elektronik, IT, AI akan dipakai, semua transaksi yang nanti akan dipungut sesuai dengan undang-undang yang berlaku," tuturnya.

Hasjim mengatakan, pemerintah menargetkan peningkatan penerimaan negara hingga setara dengan Kamboja dalam kurun waktu dua sampai tiga tahun ke depan. Dia menilai, persoalan utama Indonesia bukan terletak pada lemahnya kondisi ekonomi, melainkan belum optimalnya kinerja aparat dalam mengumpulkan penerimaan negara.

"Indonesia tidak lemah, yang lemah aparatnya, yang harus kita efisiensi dan kita harus dorong," tegasnya.

Sebagai langkah awal, Hasjim juga menyinggung rencana penerapan pemungutan pajak melalui transaksi digital atau digital taxation. Kebijakan tersebut, menurutnya, akan melibatkan perbankan pemerintah, perbankan swasta, serta perusahaan teknologi finansial atau financial technology (fintech).

Dia menyebut, sejumlah perusahaan digital seperti Shopee, Lazada, dan GoTo juga akan dilibatkan dalam mekanisme pemungutan dan penyetoran pajak yang selama ini belum optimal dilakukan.

"Ini akan segera dilaksanakan tanggal 9 November, semua Bank Pemerintah, Bank Swasta, dan semua fintech termasuk Shopee, Lazada, GoTo harus ikut pungut dan harus setor pajak yang selama ini tidak dipungut," pungkasnya.

Sepintas, kebijakan tersebut terdengar seperti angin segar karena pemerintah seolah telah menemukan solusi untuk mengatasi defisit anggaran. Namun, benarkah kebijakan itu dapat menjadi jalan keluar? Atau justru berpotensi menimbulkan persoalan baru bagi pelaku usaha dan pemerintah daerah?

Sebab, selama ini pelaku usaha UMKM telah dibebani oleh serangkaian kebijakan perpajakan di daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Parkir, dan Pajak Barang/Jasa Tertentu (PBJT).

Menanggapi hal tersebut, akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA), Hady Sutjipto, menilai pemerintah perlu membedakan antara upaya memperluas pencatatan aktivitas ekonomi informal dengan memperluas pengenaan pajak. Sebab, kedua hal tersebut memiliki pengertian dan konsekuensi yang berbeda.

Menurutnya, aktivitas ekonomi yang belum tercatat dalam administrasi perpajakan tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai kegiatan ilegal atau bentuk penghindaran pajak. Terlebih, masih banyak pelaku usaha mikro yang memang belum memenuhi ketentuan sebagai pengusaha kena pajak (PKP).

"Jadi, yang harus diluruskan ini penting. Kalau bicara kegiatan ekonomi yang belum tercatat dalam administrasi perpajakan, ini kan tidak otomatis merupakan kegiatan yang melanggar hukum atau istilahnya menghindari pajak. Kenapa? Karena banyak pelaku usaha mikro yang memang belum diwajibkan dipungut PPN," ujarnya.

Hady juga menyoroti penggunaan angka Rp10 ribu triliun yang disebut Hasjim sebagai potensi aktivitas ekonomi yang belum tercatat. Menurutnya, transaksi yang tidak disertai kuitansi tidak otomatis berarti belum diperhitungkan dalam produk domestik bruto (PDB).

Sebab, Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki metode tersendiri untuk memperkirakan aktivitas ekonomi informal, termasuk melalui survei dan pendekatan statistik lainnya.

"Jadi, kalaupun estimasi informal ada Rp10 ribu triliun, ini tidak langsung dianggap sebagai tambahan PDB yang seluruhnya belum dihitung. Jadi, itu yang harus diluruskan," jelasnya.

Lebih jauh, Hady menilai rencana pengenaan PPN 11 persen terhadap seluruh pelaku UMKM tanpa mempertimbangkan besaran omzet, kemampuan usaha, dan karakteristik kegiatan ekonomi berpotensi menimbulkan dampak negatif. Salah satunya adalah kenaikan harga barang dan jasa yang pada akhirnya dapat menekan daya beli masyarakat.

Dia menjelaskan, secara teori, PPN merupakan pajak konsumsi yang bebannya secara ekonomi dapat diteruskan oleh pelaku usaha kepada konsumen melalui kenaikan harga.

Sebagai gambaran, apabila jasa potong rambut yang sebelumnya dipatok Rp20 ribu dikenai PPN 11 persen, konsumen harus membayar Rp22.200. Meski kenaikan tersebut terlihat kecil dalam satu transaksi, dampaknya dapat semakin terasa ketika kenaikan harga terjadi pada berbagai barang dan jasa sekaligus.

"Jadi, kalau misalnya tadi ada contohnya itu tukang cukur yang sekarang pasaran Rp20.000, katakanlah, dengan dikenakan PPN 11 persen berarti harga yang harus dibayar Rp22.200. Kelihatannya kecil untuk satu transaksi. Tapi ketika masyarakat menghadapi kenaikan harga barang dan jasa sekaligus, ini pengaruhnya akumulasi," katanya.

Menurut Hady, kondisi tersebut terutama akan dirasakan rumah tangga berpendapatan rendah yang sebagian besar penghasilannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Selain menekan daya beli masyarakat, kebijakan tersebut juga berpotensi memperkecil margin keuntungan pelaku UMKM. Pasalnya, mereka dihadapkan pada dua pilihan, yakni menaikkan harga jual dengan risiko kehilangan pelanggan atau mempertahankan harga dengan konsekuensi keuntungan yang semakin menipis.

Dampak lainnya, kata dia, justru berpotensi memperbesar sektor informal. Kewajiban perpajakan yang terlalu rumit dan membebani pelaku usaha kecil dapat mendorong sebagian pengusaha menghindari pencatatan transaksi atau bahkan memecah kegiatan usahanya.



Akademisi UNTIRTA, Hady Sutjipto



Akademisi UNPAM Serang, Muhammad Nur Fahruqi



Sekda Kabupaten Lebak, Halson Nainggolan

"Jadi, ketika kewajiban perpajakan ini terlalu rumit dan membebani pengusaha kecil, tentu sebagian pengusaha berupaya untuk menghindari pencatatan atau memecah kegiatan usaha dan sebagainya. Jadi, ini justru semakin membuat transaksi menjadi informal," ungkapnya.

Sementara itu, akademisi Universitas Pamulang (UNPAM) Serang, Muhammad Nur Fahruqi, juga menilai penerapan PPN 11 persen terhadap UMKM akan berdampak langsung terhadap aktivitas usaha. Menurutnya, kenaikan harga jual menjadi salah satu konsekuensi yang berpotensi terjadi apabila beban pajak dialihkan kepada konsumen.

Dia menjelaskan, kenaikan harga akan memengaruhi permintaan terhadap barang yang dijual UMKM. Dalam teori keseimbangan pasar, pengenaan pajak dapat menggeser kurva keseimbangan ke kiri atas sehingga harga meningkat dan jumlah barang yang diminta maupun ditawarkan mengalami penurunan.

Selain itu, pelaku UMKM juga harus menghadapi tambahan beban administrasi untuk memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan.

"Tentu kebijakan ini akan berdampak langsung kepada UMKM, di antaranya bahwa UMKM akan menaikkan harga penjualannya kepada konsumen sehingga penawaran terhadap barang UMKM akan menurun. Selanjutnya, UMKM akan direpotkan dengan administrasi untuk dilaporkan ke kantor pajak," jelasnya.

Fahruqi bahkan memprediksi, apabila tarif PPN 11 persen tersebut diterapkan terhadap UMKM, perolehan laba pelaku usaha berpotensi melambat sekitar 2 persen. Kondisi tersebut dinilai dapat melemahkan daya saing UMKM di pasar.

Menurutnya, kenaikan harga barang dan jasa tidak selalu diikuti peningkatan pendapatan masyarakat. Akibatnya, konsumen akan lebih selektif dalam membelanjakan uang, terutama untuk memenuhi kebutuhan tersier.

"Jika melihat angka 11 persen tarif pajak baru, saya memprediksi UMKM akan melambat dalam perolehan laba mereka sebesar 2 persen. Hal ini akan melemahkan daya saing UMKM di pasar. Ini disebabkan oleh pelemahan daya beli konsumen karena harga yang naik, namun pendapatan mereka tetap," paparnya.

Tidak hanya berdampak terhadap pelaku usaha dan konsumen, rencana kebijakan tersebut juga dinilai berpotensi memengaruhi penerimaan kas daerah. Terlebih, pemerintah kabupaten dan kota selama ini memiliki kewenangan memungut sejumlah pajak daerah dari aktivitas ekonomi masyarakat.

Menanggapi persoalan tersebut, Hady menjelaskan bahwa PPN merupakan pajak pemerintah pusat sehingga penerimaannya tidak secara otomatis masuk ke kas pemerintah daerah. Sementara itu, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan bagian dari pajak daerah yang memiliki ketentuan tersendiri.

Dia merujuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), yang mengatur objek PBJT meliputi makanan dan minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan.

Dengan demikian, menurutnya, tidak semua jenis usaha secara otomatis menjadi objek PBJT. Pemerintah daerah memiliki kewenangan menetapkan batas omzet melalui peraturan daerah sehingga pengenaan pajak perlu mempertimbangkan skala dan karakteristik masing-masing usaha.

"Jadi, kalau larinya tadi ke tukang cukur, warteg, tidak semua otomatis warteg wajib memungut PBJT. Karena Undang-Undang HKPD memberikan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan batas omzetnya berapa dalam perda nantinya. Termasuk jasa potong rambut dan pijat, juga harus diklasifikasikan skalanya. Tidak semua jenis usaha disamakan," terangnya.

Hady menambahkan, penerapan PPN 11 persen juga berpotensi memengaruhi penerimaan pajak daerah secara tidak langsung. Sebab, apabila kenaikan harga membuat konsumsi masyarakat melemah, aktivitas ekonomi pada sektor-sektor yang menjadi objek pajak daerah dapat ikut mengalami penurunan.

Di sisi lain, dia menilai digitalisasi administrasi perpajakan justru dapat menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Terutama apabila pemerintah mampu memperbaiki basis data omzet usaha, mendata objek pajak yang belum terdaftar, serta menyinkronkan transaksi aktual dengan laporan perpajakan.

"Jadi, salah satu persoalan administrasi perpajakan daerah adalah keterbatasan data omzet usaha, objek pajak yang belum terdaftar, kemudian adanya perbedaan antara transaksi aktual dan transaksi yang dilaporkan. Ini yang harus diperbaiki melalui integrasi data dan sistem pembayaran," katanya.

Senada dengan Hady, Fahruqi juga mengingatkan adanya potensi perlambatan penerimaan pajak daerah apabila daya beli masyarakat mengalami penurunan. Menurutnya, dampak tersebut dapat merembet ke sejumlah sektor yang selama ini menjadi sumber penerimaan daerah.

Dia menjelaskan, kenaikan PPN berpotensi meningkatkan beban rantai pasok atau *supply chain* sehingga harga barang dan jasa ikut terdorong naik. Ketika konsumsi masyarakat pada sektor rumah makan, perhotelan, parkir, dan hiburan berkurang, dasar pengenaan pajak (DPP) untuk PBJT juga berpotensi menyusut.

"Ketika tingkat konsumsi masyarakat pada sektor-sektor objek PBJT, seperti rumah makan, hotel, parkir, dan hiburan, berkurang, dasar pengenaan pajak untuk PBJT ikut tergerus. Akibatnya, potensi setoran PBJT yang masuk ke kas daerah mengalami perlambatan," paparnya.

Selain PBJT, Fahruqi menyebut pertumbuhan penerimaan Pajak Reklame juga berpotensi melambat. Hal itu karena pelaku usaha kemungkinan mengurangi anggaran promosi ketika menghadapi tekanan keuangan.

Sementara itu, penerimaan PBB-P2 dari sektor komersial juga rentan mengalami keterlambatan pembayaran akibat persoalan likuiditas atau ketersediaan kas pelaku usaha.

Di tengah potensi dampak tersebut, Hady menilai pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat koordinasi agar upaya meningkatkan penerimaan pajak tidak justru membebani pelaku usaha mikro.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah mempertahankan perlindungan perpajakan bagi usaha mikro melalui evaluasi batas omzet secara berkala dengan mempertimbangkan inflasi, kondisi ekonomi, serta kemampuan administrasi pelaku usaha.

Selain itu, pemerintah dapat mengutamakan digitalisasi pencatatan transaksi sebelum melakukan pemungutan pajak. Penggunaan sistem pembayaran digital seperti QRIS dinilai dapat membantu pelaku usaha menyusun pembukuan sederhana sehingga omzet dan aktivitas transaksi lebih mudah diketahui.

"Yang kedua memang bisa diutamakan digitalisasi, pencatatan sebelum pemungutan. Artinya, perluas penggunaan QRIS. Itu kan pembukuan sederhana, pencatatan transaksi elektronik. Berapa pemasukan itu jelas setiap transaksinya. Nah, itu yang nanti akan terlihat, apakah kena PPN atau tidak," ujarnya.

Hady juga mendorong pemerintah agar lebih dahulu menyasar wajib pajak dengan kapasitas usaha besar yang sebenarnya telah memenuhi kewajiban perpajakan, tetapi belum menjalankan kepatuhan secara optimal.

Di samping itu, integrasi data perpajakan antara Direktorat Jenderal Pajak, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan dinas yang membidangi UMKM perlu diperkuat. Langkah tersebut diperlukan untuk membedakan transaksi yang menjadi objek PPN, PBJT, maupun transaksi yang tidak termasuk keduanya.

Pemerintah juga dinilai perlu memberikan insentif kepada UMKM yang bersedia bertransformasi menjadi usaha formal, antara lain melalui pendampingan pembukuan, kemudahan perizinan, pelatihan digital, dan perluasan akses pasar.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lebak, Halson Nainggolan, tidak memungkiri jika ide gagasan tersebut diberlakukan maka akan berdampak signifikan terhadap kegiatan perekonomian. Tidak hanya itu penerimaan kas daerah pun juga secara tidak langsung akan turut terdampak atas kebijakan tersebut.

Meski demikian, kata Halson, Pemkab Lebak hanya bisa mengikuti tanpa bisa menolak kebijakan tersebut apabila benar-benar diterapkan.

"Tentu kalau sudah jadi kebijakan, kita tidak dalam posisi setuju atau tidak. Tentu saja jika beban pelaku usaha bertambah dengan sendirinya akan berdampak ke pajak daerah," ucapnya kepada BANPOS.(*)

ISTIMEWA



Persita Kalah Tipis

Kandas di Kandang Sendiri

SERANG, BANPOS – Persita Tangerang harus menelan pil pahit kekalahan tipis saat menjamu Isenmulang Kalteng FC. Kekalahan mengejutkan tersebut tersaji pada laga pekan kesembilan kompetisi BRI Super League 2026/27 di Stadion Internasional Banten pada hari Sabtu. Hasil minor di kandang sendiri ini sekaligus mencoreng rekor impresif skuad berjuluk Pendekar Cisadane di hadapan para suporter setianya.

Pasalnya, Persita tercatat sebagai satu-satunya kesebelasan yang belum pernah tersentuh kekalahan sebelum pekan kesembilan kompetisi resmi bergulir. Sementara itu, kubu tim tamu datang dengan modal catatan minor baru mengemas satu kemenangan sepanjang musim ini.

"Pada babak kedua, kami mendapat peluang dan berhasil mengonversinya menjadi gol," ujar Pelatih Kepala Isenmulang Kalteng FC Mundari.

Gol tunggal penentu kemenangan skuad tamu dicetak oleh penyerang asing berbahaya Adilson Silva pada menit ke-68 pertandingan. Gol tersebut sukses membungkam publik tuan rumah yang mendominasi jalannya penguasaan bola sejak menit awal babak pertama. Tambahan tiga angka penuh ini berhasil mendongkrak posisi Isenmulang keluar dari zona degradasi klasemen sementara.

Skuad asal Kalimantan tersebut kini sukses bertengger di peringkat ke-15 dengan mengoleksi total raihan enam poin. Di sisi lain, kekalahan menyakitkan ini menjadi evaluasi serius bagi lini serang Persita dalam membongkar rapatnya barisan pertahanan lawan.

"Sejujurnya ini hasil di luar dugaan saya karena performa Persita sangat luar biasa," kata Mundari.

Sepanjang babak pertama, lini pertahanan Isenmulang sempat berada dalam tekanan hebat akibat gempuran bertubi-tubi skuad tuan rumah. Namun, kedisiplinan barisan belakang berhasil meredam berbagai gelombang serangan berbahaya hingga peluit babak turun minum dibunyikan wasit. Strategi bertahan terukur sengaja diterapkan pelatih untuk mengantisipasi ancaman skema serangan balik cepat lini depan Persita.

Pelatih tim tamu secara khusus menginstruksikan anak asuhnya menerapkan taktik mid block saat kehilangan penguasaan bola di lapangan. Pendekatan defensif disiplin itu diambil demi menghindari insiden kekalahan telak seperti saat melawat ke markas lawan pekan lalu.

"Kalau dilihat pada babak pertama, sebetulnya lawan hanya tinggal menunggu momentum untuk mencetak gol saja," jelasnya.

Memasuki paruh kedua pertandingan, para pemain tuan rumah mulai tampak terpancing emosi akibat tuntutan wajib mencetak gol balasan. Celah kelengahan vital tersebut dimanfaatkan secara maksimal oleh skuad Isenmulang untuk mencuri gol kemenangan krusial.

"Alhamdulillah dari babak pertama hingga menit-menit akhir babak kedua, gawang kami tetap aman," tambah Mundari dengan rasa syukur. (ANT/AZM)

ISTIMEWA



Veda Ega Pratama Finis Keempat Qatar

LUSAIL, BANPOS – Pembalap muda kebanggaan Indonesia Veda Ega Pratama tampil sangat luar biasa pada seri pembuka ajang balap Moto3 Qatar 2026. Memulai lomba dari urutan ke-14, ia berhasil merangsek naik secara konsisten hingga finis gemilang di posisi keempat klasemen akhir.

Aksi gemilang tersebut tersaji di Sirkuit Lusail, Qatar, pada hari Minggu malam waktu Indonesia bagian barat secara langsung. Meskipun sempat tercecer turun ke posisi ke-15 selepas start, pembalap Honda Team Asia itu menunjukkan mental kompetitif tangguh di lintasan balap.

Perjuangan pembalap berbakat asal DI Yogyakarta berusia 17 tahun itu diwarnai aksi saling salip posisi yang sangat dramatis sekali. Memasuki lap kedua, ia sukses menembus urutan kedelapan sebelum terus merangsek maju menembus barisan kelompok terdepan lomba.

Aksi saling mendahului terus terjadi tatkala ia bertarung secara ketat melawan pembalap Spanyol Alvaro Carpe di tikungan sirkuit. Menjelang lap-lap akhir balapan, ia kembali merebut posisi keempat dan berhasil mempertahankannya dengan sangat baik hingga menyentuh garis finis.

Kemenangan balapan kelas Moto3 Qatar tersebut akhirnya direbut oleh pembalap asal Spanyol David Almansa dengan catatan waktu tercepat. Posisi kedua ditempati Adrian Fernandez, sementara Maximo Quiles melengkapi podium tiga besar di Sirkuit Lusail malam hari itu.

Veda menyudahi balapan dengan catatan waktu selisih terpaut 5.653 detik dari sang juara utama di garis finis. Hasil impresif ini membuktikan kapasitas atlet muda Indonesia untuk bersaing secara kompetitif di level kejuaraan dunia bergengsi.

Pengamat otomotif menilai pencapaian luar biasa ini sebagai tonggak sejarah baru bagi perkembangan dunia balap tanah air tercinta. Prestasi membangkakan tersebut tentu menumbuhkan harapan besar bagi seluruh pencinta olahraga otomotif di Indonesia.

Seri perdana musim ini menyajikan pertarungan sengit antar-pembalap muda berbakat dari berbagai belahan dunia internasional. Atmosfer kompetisi yang sangat ketat menuntut tingkat konsentrasi tinggi serta stamina fisik prima dari setiap peserta lomba.

Keberhasilan menembus barisan elite papan atas dunia ini menegaskan potensi besar pembalap muda Indonesia di kancah internasional. Masa depan yang sangat cerah kini terbuka lebar bagi perjalanan karier profesional sang atlet berbakat kebanggaan tanah air. (ANT/AZM)

Peluang Membawa Verstappen Ke Tanah Air

JAKARTA, BANPOS - Peluang membawa Verstappen ke tanah air masih terbuka sangat lebar melalui kerja sama erat bersama pihak swasta. Brand perawatan rambut Clear menyatakan terus menjalin komunikasi intensif dengan manajemen tim Oracle Red Bull Racing.

Upaya mendatangkan sang juara dunia Formula 1 tersebut tentu sangat bergantung pada kecocokan jadwal kedua belah pihak. Kemitraan strategis ini terjalin sejak dimulainya kerja sama sponsor global pada musim kompetisi tahun 2026.

"Mari kita doakan ya agar cocok waktu mereka cocok. Pasti akan kami komunikasikan," kata Beuty & Wellbeing Indonesia Marketing Demand Creation Hair Care Unilever Indonesia Ari Astuti di Jakarta, Minggu.

Tim pabrikan asal Austria tersebut saat ini diperkuat oleh dua pembalap andalan Max Verstappen serta Isack Hadjar. Kedua pembalap profesional itu resmi dipasangkan sebagai pengemudi utama sejak awal bergulirnya musim balap tahun 2026.

Menyongsong musim balap 2027 mendatang, Verstappen yang telah mengantongi empat gelar juara dunia dipastikan tetap bertahan. Ia akan terus bertandem bersama rekan setimnya Isack Hadjar setelah menyelesaikan pembaruan kontrak bersama tim.

"Kerja sama dengan Oracle Red Bull itu dimulai tahun ini ya, dan ini memang kerjasama global," kata dia.

Sebelumnya, Clear bersama tim Oracle Red Bull sukses menggelar rangkaian kampanye kesehatan publik di Jakarta. Acara tersebut melibatkan sejumlah figur publik pria aktif menyusuri jalanan ibu kota.

Kehadiran figur pembalap kelas dunia di Indonesia diyakini mampu mendongkrak antusiasme para penggemar setia olahraga otomotif nasional. Dukungan penuh dari berbagai pihak swasta menjadi motor penggerak utama terwujudnya rencana besar tersebut.

Koordinasi lanjutan terus dimatangkan secara matang guna memastikan seluruh agenda promosi berjalan lancar tanpa ada hambatan berarti. Publik tanah air tentu sangat menantikan kepastian kedatangan sang bintang utama ajang balap mobil Formula 1 ke ibu kota. (ANT/AZM)

Judoka Indonesia Berhasil Raih Dua Perunggu

ISTIMEWA



Judoka Indonesia raih dua medali perunggu dan tiga posisi lima besar di kejuaraan internasional Yordania dan Senegal 2026.

JAKARTA, BANPOS - Para judoka Indonesia sukses Raih Dua Perunggu serta tiga posisi lima besar dari ajang kejuaraan internasional. Kompetisi tersebut berlangsung di Amman, Yordania, dan Dakar, Senegal, akhir Oktober hingga awal November 2026.

Medali perunggu pertama dipersembahkan oleh Hagia Sofya Raditya pada Kejuaraan Judo Junior Asia 2026 di Yordania. Ia tampil sangat gemilang di kelas minus 48 kilogram putri.

"Itu prestasi yang menggembirakan. Saya mengapresiasi perjuangan para atlet, pelatih, dan seluruh tim yang telah bekerja keras membawa nama Indonesia di level dunia. Hasil itu menunjukkan bahwa judoka kita memiliki kemampuan untuk bersaing di tingkat internasional," kata Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PB PJSI) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.

Wenny Luna San Purba menyusul di peringkat kelima kelas plus 78 kilogram putri. Sementara itu, Dinny Febriany bersama Chelsie Tifany Cia finis kelima di kelas minus 57 kilogram Amman Asian Open 2026.

Prestasi membanggakan berikutnya ditorehkan oleh judoka muda Sashenka Cahaya Fatimah di ajang Youth Olympic Games Dakar 2026. Sashenka merebut medali perunggu kelas minus 63 kilogram putri usai menundukkan perwakilan Aljazair Dounia Berrahoual.

"Pencapaian para judoka Indonesia di Amman perlu dijadikan momentum untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan kesiapan atlet menghadapi persaingan internasional yang semakin ketat. Kita perlu terus memperbaiki kemampuan teknik, strategi pertandingan, fisik, dan mental bertanding," ujar Maruli.

Sebelumnya, atlet muda berbakat tersebut juga pernah meraih medali emas pada ajang Asian Youth Games Bahrain 2025. Keberhasilan beruntun ini membuktikan efektivitas sistem regenerasi atlet yang diterapkan induk organisasi.

Sekretaris Jenderal PB PJSI Maria Regina Vega secara langsung menyambut kepulangan para atlet di Bandara Soekarno-Hatta. Ia sebelumnya telah melaporkan seluruh hasil gemilang kejuaraan tersebut kepada Ketua Umum.

"Pencapaian para judoka Indonesia di Yordania dan Senegal harus menjadi motivasi untuk memperkuat pembinaan, meningkatkan kualitas kepelatihan, serta memberikan kesempatan bertanding yang lebih luas bagi para atlet," kata mantan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) tersebut.

Pihak pengurus pusat berharap seluruh prestasi gemilang ini mampu memicu semangat para atlet muda lainnya di tanah air. Pembinaan berkelanjutan terus digalakkan demi melahirkan bibit unggul berprestasi di kancah global. (ANT/AZM)

Murak Liwet Kastrol, Tradisi Kebersamaan Santri yang Mengakar di Lebak

AROMA nasi liwet yang mengepul dari kastrol berpadu dengan suasana kebersamaan ribuan santri di sepanjang Jalan Multatuli hingga kawasan Alun-alun Rangkasbitung. Beralaskan daun pisang, mereka duduk berjejer dan menyantap hidangan secara bersama-sama. Tradisi itu dikenal dengan sebutan Murak Liwet Kastrol, budaya khas santri di Kabupaten Lebak yang selalu dinantikan setiap peringatan Hari Santri Nasional (HSN).

Bagi kalangan santri, kegiatan tersebut bukan sekadar makan bersama. Murak Liwet Kastrol menjadi simbol kesederhanaan, kebersamaan, dan persaudaraan yang selama ini tumbuh dalam kehidupan pesantren.

Panitia Hari Santri Lebak, Ihsanudin, mengatakan tradisi murak liwet menjadi salah satu kegiatan yang memiliki makna tersendiri dalam peringatan Hari Santri. Melalui tradisi tersebut, para santri dari berbagai pondok pesantren dapat berkumpul dan merasakan kebersamaan tanpa sekat.

"Murak Liwet Kastrol ini bukan hanya tentang makan bersama, tetapi bagaimana kita merawat kebersamaan dan persaudaraan antarsantri. Semua duduk bersama, menikmati hidangan yang sama, tanpa membedakan asal pesantren maupun latar belakang masing-masing," ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, ribuan santri biasanya berkumpul di pusat Kota Rangkasbitung. Nasi liwet disajikan menggunakan kastrol, kemudian disantap bersama di atas hamparan daun pisang yang dibentangkan sepanjang lokasi kegiatan.



Murak Liwet, Budaya santri di Lebak yang sudah menjadi tradisi berkelanjutan

Tradisi ini menghadirkan suasana khas pesantren di tengah ruang publik. Santri saling berbagi lauk dan hidangan, bercengkerama, serta menikmati kebersamaan dalam suasana sederhana.

Ihsanudin menilai, nilai utama dari tradisi tersebut terletak pada semangat berbagi. Kesederhanaan sajian nasi liwet dan penggunaan daun pisang sebagai alas justru memperlihatkan bahwa kebahagiaan tidak harus hadir melalui sesuatu yang mewah.

"Dari murak liwet ini kita belajar bahwa kebersamaan tidak harus dibangun dengan kemewahan. Cukup dengan hidangan sederhana, duduk bersama, saling berbagi, dan menjaga persaudaraan. Nilai-nilai seperti inilah yang ingin terus kita hidupkan dalam kehidupan santri," katanya.

Lebih dari sekadar tradisi kuliner, Murak Liwet Kastrol juga menjadi bagian dari identitas budaya pesantren di Lebak. Kegiatan tersebut memperlihatkan bahwa pesantren tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu agama, tetapi juga ruang pembentukan karakter, kepedulian sosial, dan semangat gotong royong.

Menurut Ihsanudin, tradisi ini perlu terus dipertahankan agar generasi santri berikutnya tetap mengenal budaya kebersamaan yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat pesantren di Lebak.

"Harapannya, Murak Liwet Kastrol tidak hanya menjadi kegiatan tahunan saat Hari Santri, tetapi juga menjadi tradisi yang terus dikenang dan diwariskan. Ini bagian dari kekayaan budaya santri Lebak yang harus kita jaga bersama," tandasnya.

Di atas hamparan daun pisang dan di antara kastrol-kastrol nasi liwet, tersimpan pesan sederhana tentang arti persaudaraan. Bahwa santri boleh datang dari pesantren dan daerah yang berbeda, tetapi kebersamaan selalu menemukan tempat untuk menyatukan mereka. (MYU/AZM)



Bus Sekolah Ana Ning Ndi?

CEES BANPOS kabeh sing dirahmati Gusti Allah. Mang Jaseng pirang-pirang dina ngopi sembari ngelamun ning teras umah, keingetan jaman bengen waktu masih rame-ramene program bus sekolah gratis ning Kabupaten Serang. Jaman kepemimpinane Ibu Bupati Ratu Tatu Chasanah bengen, sekitar taun 2017, program iki sempet dadi primadona lan dibanggakaken pisan. Bocah-bocah sekolah pada bungah, wong tuwa geh pada seneng lantaran kebantu pisan urusan ongkos saban dinane.

Tapi coba deleng saiki, lur. Mang Jaseng sering keliling jalan-jalan ning wilayah Kabupaten Serang, sing ujung lor sampe idul, sing ulon sampe etan. Lha kok rasane sepi amat ya? Bus sekolah atawa angkutan perintis gratis sing bengen gagah wara-wiri nganteraken bocah sekolah, saiki kaya ilang ditelen bumi. Eksistensine wis ora kedeleng maning ning dalanan. Bocah-bocah sekolah saiki balik maning kaya bengen, ana sing pada nekat numpak motor dewek padahal durung cukup umur, ana geh sing kudu ngetem suwe ngenteni angkot ning pinggir dalan.

Mang Jaseng penasaran kan, terus takon-takon karo batur sing sering liwat Kawasan Pakupatan, Kota Serang. Eh, nyatane bener bae! Mobil bus sekolah sing jumlahe ana pirang-pirang unit iku udu ilang, tapi malah pada *standby* alias nongkrong manis ning pelataran Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Serang ning Pakupatan kono. Lha iki kepremen ceritane, lur? Mobil dituku nganggo duwit rakyat, niate kanggo ngladeni rakyat, kok malah diangguraken bae kena panas udan ning kantor dinas?

Padahal ya lur, lamun dipikir-pikir nganggo akal sehat, kondisi ekonomi masyarakat saiki lagi ora karu-karuan. Harga beras larang, kebutuhan dapur munggah kabeh, ditambah ngulati duwit lagi angel pisan. Wong tuwa murid ning kampung-kampung iku lagi pada pusing mikiraken biaya sekolah anake. Ongkos angkot sedina bolak-balik bae lamun dikumpulaken sewulan wis lumayan gede kanggo ukuran wong cilik mah. Duwit ongkos iku padahal bisa kanggo tuku beras pirang-pirang liter!

Makane, Mang Jaseng pengen ngelingaken karo pejabat Pemkab Serang, khususon Bapak-bapak ning Dishub Kabupaten Serang. Coba mobil bus sekolah sing lagi pada turu ning Pakupatan iku diuripaken maning mesine, diservis sing bener, terus dioperasikaken maning kanggo ngangkut bocah-bocah sekolah. Sayang pisan aset daerah lamun cuma dadi pajangan doang mah, suwe-suwe malah rusak dipangan teyeng. Masyarakat Kabupaten Serang saiki bener-bener lagi butuh pisan bantuan nyata sing pemerintah. Ayo ah Pak Dishub, bus sekolahe ditokaken maning sing kandange! (*)

DEBUS ORA TEMBUS

Filosofi Kekuatan Atas Izin-Nya



FENOMENA kesenian tradisional Debus Ora Tembus menjadi identitas utama yang mencerminkan kekayaan khazanah kebudayaan masyarakat di Provinsi Banten. Potensi warisan leluhur tersebut terus digali secara strategis, khususnya di wilayah Kota Serang sebagai pusat ibu kota provinsi. Hal itu diungkapkan oleh Pemerhati Budaya Banten, Devi Naufal alias Mang Dhepi, saat mengulas sejarah kesenian ekstrem tersebut.

Atraksi ketahanan tubuh terhadap benda tajam ini merupakan kesenian rakyat yang mulai tumbuh di Banten setelah abad ke-16. Kemunculan berbagai keajaiban kekuatan kebatinan masyarakat kala itu didasari oleh keimanan kuat setelah Sultan Maulana Hasanuddin mengislamkan Banten. Selain itu, tradisi tersebut erat kaitannya dengan ajaran Tarekat Rifaiah yang dibawa Nurrudin Ar-Raniry ke Aceh pada abad ke-16.

"Haram kau minum darahku, haram kau sentuh kulitku, haram kau makan dagingku," tulis Mang Dhepi mengutip mantra tradisi tersebut.

Para pengikut tarekat kerap menghantamkan benda tajam ke tubuh mereka ketika berada dalam kondisi kegembiraan spiritual yang tak terhingga. Mereka memegang teguh filosofi bahwa tiada daya upaya melainkan karena pertolongan Allah semata dalam menghadapi berbagai senjata tajam. Oleh sebab itu, pisau, golok, parang, maupun peluru sekalipun diyakini tidak akan mampu melukai tubuh atas izin Tuhan.

Catatan sejarah kesenian ini turut terdokumentasi dalam buku karya arkeolog dan budayawan Banten, almarhum Halwany Michrob, pada tahun 1989. Pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin tahun 1552-1570, kesenian ini difungsikan sebagai media dakwah untuk memikat masyarakat lokal. Selanjutnya, kesenian tersebut digunakan untuk membangkitkan semangat juang rakyat melawan penjajahan Belanda pada masa Sultan Ageng Tirtayasa tahun 1651-1672.



"Urat kawat, tulang besi, kulit baja," lanjutnya merinci kutipan mantra kekebalan tubuh yang diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur.

Kesenian Almadad ini diajarkan oleh Syekh Almadad asal Aceh menggunakan ilmu Tarekat Qodariah sehingga memiliki kemiripan dengan tradisi Deboah. Pada rentang abad ke-16 hingga ke-17 Masehi, seluruh laskar prajurit di wilayah Kesultanan Banten diwajibkan mempelajari ilmu bela diri tersebut. Bahkan, Sultan Abul Fathi Abdul Fatah kerap memimpin langsung latihan perang prajurit menggunakan senjata tombak serta pedang yang runcing.

Dalam praktiknya, struktur kelompok pertunjukan dipimpin oleh seorang syekh bersama sejumlah pezikir, pelaku atraksi, serta para penabuh alat musik. Satu hingga dua minggu sebelum pementasan, seluruh pemain wajib menjalani disiplin pantangan ketat agar selamat saat melakukan atraksi berbahaya. Pantangan utama tersebut meliputi larangan meminum minuman keras, berjudi, mencuri, hingga larangan tidur bersama istri maupun perempuan lain.

"Aku keluar dari rahim ibunda," terangnya melanjutkan penggalan kalimat sakral yang kerap dilafalkan para pemain sebelum memulai atraksi ekstrem.

Pertunjukan diawali lantunan doa, selawat, serta zikir yang diiringi tabuhan harmonis kendang, terbang gede, bedug kecil, terompet penca, dan kecrek. Setelah seruan Almadad menggema, pemain mulai menghantamkan palu besar ke pangkal gada besi runcing yang menempel di perut rekannya. Atraksi kemudian berlanjut pada aksi mengiris tubuh dengan golok, mengunyah bola lampu, tiduran di atas paku, hingga menggoreng telur di kepala.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Provinsi Banten, tercatat ada 12 grup kesenian debus yang tersebar di wilayah Kota Serang. Kelompok tersebut meliputi grup Surosowan pimpinan H. Idris di Kecamatan Walantaka dan Paku Banten pimpinan Jasiman dengan masing-masing 20 anggota. Selain itu, terdapat grup pimpinan Tb. Ruchyat Zen beranggotakan 45 orang di Lopang Gede serta TTKDH pimpinan Kundang Z.A. dengan 15 anggota.

"Aku masuk pada kalimah la ilaha illahu," tutup Mang Dhepi menegaskan fondasi tauhid di balik atraksi Sanggar Seni Debus beranggotakan 150 orang tersebut. (AZM)



PENGUMUMAN LELANG ULANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Menunjuk pelaksanaan lelang pada tanggal 22 September 2026 dan Pengumuman Lelang Kedua pada Surat Kabar Banten Pos pada tanggal 08 September 2026 Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Sudirman Semanggi, akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang I, terhadap barang jaminan an. Fath Armada Sukardi dilelang berupa:

Obyek Lelang		Keterangan
Sebidang tanah seluas 75m² berikut bangunan dan segala sesuatu yang melekat dan berdiri diatasnya sesuai dengan SHM NIB No.28.07.000014289.0, terdaftar atas nama FATH ARMADA SUKARDI terletak di Amadea Town House No. B 3 RT.004 RW.006, Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang selatan, Provinsi Banten.	Nilai Limit Rp1.200.000.000,- Jaminan Penawaran Lelang Rp120.000.000,-	- Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan nominal jaminan yang diisyaratkan (tidak boleh dicicil). - Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang (23.59 WIB). - Pemenang Lelang akan dikenakan PPN sebesar 1.2%. - Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. - Pengenaan BPHTB atas perolehan tanah dan/atau bangunan mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah dimana objek lelang berada.

Cara Penawaran	:	*Open Bidding*
Hari dan Tanggal	:	**Senin, 16 November 2026**
Batas Akhir Waktu Penawaran	:	**Senin, 16 November 2026 Puku: 10:00 WIB (sesuai waktu server)**
Waktu Penawaran	:	Sejak Tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran
Alamat Domaian	:	lelang.go.id
Tempat Lelang	:	KPKNL Tangerang I, Jalan Taman Makam Pahlawan Taruna, Kota Tangerang
Penetapan Pemenang	:	Setelah batas akhir penawaran
Pelunasan Harga Lelang	:	5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
Bea Lelang Pembeli	:	2% dari harga lelang
Informasi Lebih Lanjut	:	KPKNL Tangerang I (021) 55771198, 98283200 dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Sudirman Semanggi, Telp. 021- 5746779 / 08551003536
Syarat-syarat lelang	:	- Memiliki Akun yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu" Tata cara dan prosedur" dan panduan penggunaan pada website tersebut. Objek lelang dijual apa adanya (as is) sehingga apabila karena sesuatu hal terjadi gugatan, tuntutan, pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang terhadap objek lelang tersebut di atas pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Tangerang 1 (Pejabat Lelang) dan PT. BRI Persero Tbk, - Peserta Lelang diwajibkan melihat, dan dianggap telah mengetahui kondisi objek lelang yang ditawarkan dengan keadaan apa adanya (as is) - Lelang dapat dibatalkan sebelum pelaksanaan lelang, sesuai ketentuan.

KPKNL TANGERANG I BANK BRI

Jakarta, 09 November 2026
Ttd
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,
Kantor Cabang Sudirman Semanggi

PENGUMUMAN LELANG ULANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Menunjuk Pengumuman Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan yang terbit tanggal 22 Oktober 2026 pada surat Kabar Harian Banten Pos dan pelaksanaan lelang terakhir tanggal 29 Oktober 2026, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Kalimalang sebagai Pemegang Hak Tanggungan Peringat Pertama yang berirah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", akan melaksanakan Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang I tanpa kehadiran peserta lelang melalui Aplikasi Lelang Internet dengan penawaran secara terbuka (open bidding) terhadap agunan hutang debitur atas nama PT Gondola Technology Indonesia berupa:

Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri/tertanam diatasnya seluas tanah 92 M2 sesuai SHM No 01089 terdaftar atas nama Santi Maria, yang terletak di Jalan Bahagia VII N0. 56 A, Kelurahan Kreo Selatan, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

(Nilai Limit Rp. 1.100.000.000,- dan Uang Jaminan Rp. 110.000.000,-).

- **Cara Penawaran :** Terbuka, Melalui Internet (*Open Bidding*)
- **Pelaksanaan Lelang, Hari/Tanggal :** Senin, 16 November 2026
- **Waktu Penawaran :** Sejak tayang di aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran
- **Batas Akhir Penawaran :** 16 November 2026, 09.10 WIB (sesuai Waktu Server).
- **Alamatdomain Lelang :** www.lelang.go.id
- **Tempat :** KPKNL Tangerang I, Jl. Taman Makam Pahlawan, Taruna, Kota Tangerang.
- **Penetapan Pemenang :** setelah batas akhir penawaran
- **Bea Lelang Pembeli :** 2 % dari harga lelang
- **Pelunasan Harga Lelang :** 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang

Keterangan:
- Nominal Jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan Nominal jaminan yang disyaratkan.
- Jaminan harus efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
- Pemenang lelang akan dikenakan PPN oleh Penjual sebesar 1,1% dari harga lelang sesuai ketentuan yang berlaku.
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.

Syarat-syarat lelang:
1. Memiliki Akun yang telah terverifikasi pada website **www.lelang.go.id.** Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada website tersebut. Obyek Lelang dijual apa adanya (as is) sehingga apabila karena sesuatu hal terjadi gugatan, tuntutan, pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang terhadap obyek lelang tersebut diatas, pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Tangerang I & PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
2. Peserta lelang diwajibkan melihat barang yang akan dilelang pada alamat objek Lelang mulai Pengumuman ini terbit sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
3. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Kalimalang (081234054609), atau KPKNL Tangerang I di Telp. 021 5579 4272.

KPKNL TANGERANG I BANK BRI

Jakarta, 09 November 2026

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Kantor Cabang Jakarta Kalimalang

KABUPATEN TANGERANG GENJOT OPLAH NON RAWA

Untuk Tingkatkan Produktivitas Petani

TANGERANG, BANPOS- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) setempat mengakselerasi manfaat program Optimalisasi Lahan (Oplah) non rawa seluas 245 hektare yang tersebar di enam kelompok tani guna mendongkrak produktivitas dan indeks pertanaman di wilayah tersebut.

"Bentuk kegiatannya seperti Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT), perbaikan sistem tata air dan pintu air, pembangunan irigasi perpompaan dan perpipaan, pembangunan jalan usaha tani, serta konservasi air," kata Kepala DPKP Kabupaten Tangerang Ujang Sudiartono, di Tangerang, Sabtu pekan lalu.

Ia menjelaskan bahwa kegiatan peningkatan produktivitas pertanian ini merupakan program yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian (Ditjen LIP) Kementerian Pertanian melalui alokasi dana APBN Tahun Anggaran 2026.

Menurutnya, lahan non rawa merupakan hamparan sawah yang tidak pernah atau jarang tergenang selama sebagian besar periode dalam setahun, yang dapat mencakup lahan basah non rawa maupun lahan kering.

Melalui program ini, lanjutnya, para petani diharapkan mampu meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) sekaligus mendongkrak hasil produksi pangan. Selain itu, perbaikan infrastruktur air dan lahan seperti sistem irigasi juga dirancang agar lahan pertanian terhindar dari ancaman kekeringan maupun banjir.

Sementara itu, lanjut Ujang, berdasarkan petunjuk teknis Kementerian Pertanian RI, pelaksanaan kegiatan pengolahan lahan ini dilakukan secara swakelola oleh kelompok tani, gabungan kelompok tani (gapoktan), Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A), atau Brigade Pangan yang telah ditetapkan.

"Dalam program ini, seluruh kegiatan dijalankan menggunakan sistem swakelola oleh unit pengelola kegiatan kelompok atau UPKK, di mana dana ditransfer langsung ke rekening kelompok UPKK dan dikelola sepenuhnya oleh mereka," ungkapnya.

Pelaksanaan Oplah non rawa seluas 245 hektare di Kabupaten Tangerang ini mencakup enam kelompok tani yang tersebar di lima kecamatan, yakni Kecamatan Sindang Jaya, Rajeg, Kronjo, Kresek, dan Sukamulya diantaranya seperti kelompok tani silih asuh di Desa Sindang Asih, Kecamatan Sindang Jaya (Ketua: H. Aca) – Fokus kegiatan: Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT).

Kemudian, kelompok tani sabrang mandiri, di Desa Badakanom, Kecamatan Sindang Jaya (Ketua: Warnoto) – Fokus kegiatan: Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT). Kelompok tani bunga mekar, di desa Kubang, Kecamatan Sukamulya (Ketua: Kartono) – Fokus kegiatan: Pembangunan sumur bor dan kelompok tani mandiri tani, Desa Kresek, Kecamatan Kresek (Ketua: Maksudi) – Fokus kegiatan: Pembangunan sumur bor.

ANTARA



Kelompok tani saat memanfaatkan program Optimalisasi Lahan (Oplah) non rawa guna mendongkrak produktivitas dan indeks pertanaman di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten.

"Kelompok tani pribumi III, Desa Lembangsari, Kecamatan Rajeg (Ketua: Rusdi Wijaya) – Fokus kegiatan: Pembangunan irigasi perpipaan. Kelompok tani blukbuk luwung, Desa Blukbuk, Kecamatan Kronjo (Ketua: Supiadi) – Fokus kegiatan: Pembangunan irigasi perpompaan," paparnya.

Melalui sinergi pusat dan daerah serta pengelolaan mandiri yang transparan oleh kelompok tani, Pemkab Tangerang optimistis ketersediaan air irigasi yang lebih baik dapat menjaga ketahanan pangan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.(ANT/RUS)

Menteri Ekraf: Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif Didominasi Generasi Z

TANGERANG BANPOS - Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya mengatakan jumlah tenaga kerja di sektor ekraf secara nasional telah mencapai 27,4 juta orang yang didominasi generasi Z dan milenial di bawah usia 40 tahun serta melibatkan 58 persen pekerja perempuan.

Menurut dia, potensi ekonomi kreatif tersebar di hampir seluruh daerah dengan subsektor yang beragam, didukung oleh akar budaya yang kuat. Meski sebagian besar masih tersentral di Jawa, namun kini sudah mulai muncul potensi ekonomi kreatif dari desa di luar Jawa.

"Hal ini menunjukkan potensi yang semakin besar," kata Teuku Riefky Harsya usai membuka acara IDE-IND di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat pekan lalu.

Menurutnya, saat ini pertumbuhan kelembagaan daerah juga menunjukkan tren positif. Jika pada akhir 2024 hanya terdapat sekitar 7 provinsi yang memiliki dinas khusus bidang ekraf, kini jumlahnya telah mendekati 20 provinsi.

"Jumlah kabupaten/kota yang membentuk dinas ekraf juga ditargetkan akan bertumbuh hingga mencapai sekitar 100 daerah pada pertengahan tahun depan," ujarnya.

Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf), katanya, bersama Pemerintah daerah terus memperkuat komitmen dalam mengangkat jenama (brand) serta kekayaan intelektual (IP) lokal agar mampu bersuara di kancah nasional hingga global.

IDE-IND yang digelar di Provinsi Banten, lanjutnya, ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah dalam mengangkat karya kreatif lokal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

"Kami berharap melalui program ini, para pelaku lokal dapat bertransformasi menjadi juara nasional hingga menembus pasar global," ujarnya.

Sementara itu untuk menghadapi tantangan berupa akses pasar, konsistensi, serta keberlanjutan kualitas dan produksi, Kementerian Ekraf menyiapkan tiga program utama yakni aktivasi desa kreatif, aktivasi kreatif hub dan kreatif oleh Indonesia yang salah satunya diturunkan melalui program IDE-IND

"Melalui kolaborasi erat antara pusat dan daerah ini, pemerintah optimistis para pelaku ekonomi kreatif lokal dapat terus meningkatkan kualitas produknya dan memperluas akses pasar demi mewujudkan kemandirian bangsa," ujarnya.

Wakil Gubernur (Wagub) Banten, Dimyati Natakusumah menambahkan Banten memiliki sumber daya manusia yang sangat handal. Menurutnya, jika selama ini perbincangan ekonomi kerap berfokus pada sumber daya alam yang lama-kelamaan bisa habis, kekayaan intelektual justru sebaliknya.

Maka itu, Wagub meminta kepada generasi muda di Banten agar tidak hanya bercita-cita menjadi aparatur sipil negara (ASN), melainkan berwirausaha melalui sektor ekonomi kreatif.

"Kalau kekayaan intelektual yaitu ide atau kreativitas, itu malah membuat warga bertambah dan meningkatkan kekayaan atau sumber pendapatan yang diraih, termasuk membuka lapangan pekerjaan dan kemandirian," ujarnya.(ANT/RUS)

KORMI Atur Lapak UMKM Mudah Dijangkau di Arema Forprov

ANTARA



Sejumlah atlet sedang melakukan latihan di kawasan Puspemkot Tangerang.

TANGERANG, BANPOS - Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kota Tangerang telah mengatur lapak pelaku UMKM di 24 arena pertandingan selama Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Provinsi (Forprov) II Banten berlangsung, mudah dijangkau guna membantu peningkatan perekonomian daerah.

Ketua Umum KORMI Kota Tangerang, Sulfi Afriyadi di Kota Tangerang, Minggu (8/11) mengatakan keterlibatan pelaku UMKM dalam ajang Forprov adalah bagian dari komitmen Pemkot Tangerang agar ajang terbesar di Provinsi Banten tersebut berdampak luas, tak hanya sektor olahraga tetapi juga ekonomi.

Apalagi ada sekitar 30 ribu pegiat olahraga dan kontingen dari kabupaten/kota yang hadir ke Kota Tangerang untuk meramaikan Forprov II Banten 2026. Hal tersebut pasti menggerakkan perekonomian daerah melalui penginapan di hotel dan kunjungan ke restoran untuk menikmati kuliner daerah.

"Kami berharap Forprov II Banten bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tangerang karena banyak warga yang berkunjung untuk menyaksikan olahraga tradisional," kata dia.

Untuk memfasilitasi jalannya perlombaan, lanjutnya, KORMI Kota Tangerang juga bekerja sama dengan pihak swasta dengan memanfaatkan area pusat perbelanjaan.

"Ada tiga tempat yang memanfaatkan pusat perbelanjaan atau mal, yaitu Metropolis Town Square, Tangcity Mall dan Icon Walk Mall di Cimone," ujar Sulfi.

Forprov II Banten 2026 resmi dibuka oleh Gubernur Banten Andra Soni bersama Wali Kota Tangerang Sachrudin di Alun-Alun Ahmad Yani, Sabtu (7/11) malam. Forprov II Banten 2026 berlangsung selama empat hari dari tanggal 7 hingga 10 November 2026.

Mengusung semangat sehat, bugar dan penuh kebersamaan, Forprov II Banten 2026 menghadirkan puluhan Induk Organisasi Olahraga (Inorga) yang akan berkompetisi dalam 48 cabang olahraga masyarakat.

Gubernur Banten Andra Soni menegaskan Forprov bukan hanya ajang untuk mengejar prestasi, melainkan juga momentum membangun kesadaran bersama tentang pentingnya menjaga kesehatan dan kebugaran dengan olahraga yang sederhana.

Wali Kota Tangerang Sachrudin mengajak masyarakat untuk tidak sekadar menjadi penonton, tetapi turut mengenal dan mencoba berbagai olahraga yang ditampilkan dalam Forprov. Ia berharap momentum ini dapat menumbuhkan kebiasaan berolahraga sekaligus membangun masyarakat yang lebih sehat, aktif dan produktif.

“Melalui Forprov ini, kami mengajak masyarakat untuk terus bergerak dan membudayakan hidup sehat. Olahraga masyarakat dapat dilakukan oleh siapa saja dan menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari,” tambahnya.(ANT/RUS)

AP3MI Jelaskan Kriteria Produk yang Dicari Ritel Modern

TANGERANG, BANPOS - Asosiasi Pengusaha Pemasok Pasar Modern Indonesia (AP3MI) menjelaskan kriteria produk yang dicari oleh jaringan ritel modern (modern trade), antara lain faktor self life atau masa simpan yang terukur.

Ketua Bidang UMKM, Ekspor & Impor AP3MI, Irwan S. Widjaja, menjelaskan, selain masa simpan faktor lainnya adalah kualitas kemasan yang informatif, konsistensi kapasitas produksi hingga ketersediaan barcode pada setiap kemasan produk untuk mempermudah transaksi di kasir ritel.

Selama ini, katanya, pelaku usaha hanya fokus pada legalitas seperti NIB, izin edar BPOM atau P-IRT, dan sertifikasi Halal. Padahal, ada faktor lain yang perlu juga diperhatikan pelaku usaha untuk masuk ritel modern meskipun nantinya ada proses kurasi untuk kriteria produk yang dicari modern trade.

"Selain memiliki legalitas seperti NIB, izin edar BPOM atau P-IRT, dan sertifikasi Halal, pelaku usaha juga wajib harus memperhatikan faktor lainnya," kata Irwan S. Widjaja dalam keterangannya di Tangerang, Minggu (8/11).

Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Didik Joko Pursito, mengatakan, keamanan pangan merupakan fondasi mutlak dalam membangun kepercayaan publik sekaligus gerbang utama menuju pasar yang lebih luas.

Didik menjelaskan, untuk mendukung pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil (UMK), pemerintah melalui PP No. 15 Tahun 2026 telah memberlakukan tarif Rp0 atau gratis untuk penerbitan sertifikat izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (IP CPPOB) serta registrasi pangan olahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Selain itu, Didik juga menekankan mengenai pentingnya konsep pengawasan dari hulu ke hilir mulai dari pemilihan bahan baku, pengaturan Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang sesuai ketentuan, proses produksi higienis, hingga pengendalian suhu distribusi yang tepat.

"Sebagai pelaku usaha, harus memahami semua sektor. Ketika pangan tersebut memiliki kualitas baik maka akan meningkatkan kepercayaan publik," katanya.

Anggota Aprindo, FX Yudi, mengatakan, kolaborasi lintas sektor antara peritel modern, asosiasi pemasok, BPOM, dan pemerintah daerah merupakan kunci utama dalam memangkas kesenjangan akses pasar bagi UMKM.

Ia berharap melalui pendampingan intensif terkait standarisasi mutu, perizinan, dan pemahaman rantai pasok ini, produk-produk lokal buatan anak bangsa tidak lagi menjadi penonton di negeri sendiri, melainkan menjadi primadona di rak-rak ritel modern seluruh Indonesia.(ANT/RUS)

PENGUMUMAN LELANG ULANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Menunjuk pelaksanaan lelang tanggal **21 Oktober 2026** dan Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang terbit di surat kabar **BANTEN POS** pada tanggal **07 Oktober 2026**, serta berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996, **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Jakarta Tanah Abang** sebagai Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama yang berirah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, akan melaksanakan Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan melalui **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang I** tanpa kehadiran peserta lelang melalui Aplikasi Lelang Internet dengan penawaran secara terbuka **(Open bidding)** terhadap agunan hutang debitur atas nama **PT. Sinergi Niaga Indnesia** berupa:

Sebidang tanah seluas 333 m2 berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri/tertanam diatasnya sesuai SHM No. 3574/Larangan Utara terdaftar atas nama SUHARLAN terletak di Jl. Flamboyan I/05 (setempat dikenal dengan Puribeta I, Jl. Flamboyan I No. 5 RT. 001/012) Desa/Kelurahan Larangan Utara, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Propinsi Banten. **Nilai Limit Rp. 3.700.000.000,- dan (Uang Jaminan Rp. 740.000.000,-)**.

Deskripsi pelaksanaan lelang :

Hari/Tanggal	:	Senin, 16 November 2026
Waktu Penawaran	:	Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran	:	Senin, 16 November 2026 Pukul 11:00 WIB (Waktu Server)
Alamat Domain	:	lelang.go.id
Tempat Lelang	:	KPKNL Tangerang I Jl. Taman Makam Pahlawan (T.M.P) Taruna, Kota Tangerang
Penetapan Pemenang	:	setelah batas akhir penawaran
Pelunasan Harga Lelang	:	5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
Bea Lelang Pembeli	:	2% (dua persen) dari harga lelang

Syarat-syarat Lelang

1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website **lelang.go.id**.
2. Syarat ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat domain di atas.
3. Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan, dan sudah efektif diterima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
4. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
5. Pemenang lelang akan dikenakan biaya BPHTB sesuai ketentuan yang berlaku.
6. **Pemenang lelang akan dikenakan PPN sebesar 1,1 % dari harga terjual lelang**
7. Semua barang akan dijual DALAM KONDISI APA ADANYA **(as is)**, Kami menganjurkan peserta untuk memeriksa objek lelang sebelum mengikuti lelang dan apabila karena suatu hal terjadi gugatan, tuntutan dan pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang terhadap barang/objek lelang tersebut diatas pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada **KPKNL Tangerang I maupun PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Jakarta Tanah Abang**
8. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi dan **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KC Jakarta Tanah Abang, Telp. 021-3454529, Riyan HP. 0812 1328 560, Eriet HP. 0815 1863 763 atau KPKNL Tangerang I Telp. (021) 55794272**

Pelaksana Lelang

KPKNL Tangerang I

BANK BRI

Jakarta, 09 November 2026

Ttd

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
Kantor Cabang Jakarta Tanah Abang

PENGUMUMAN LELANG ULANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Menunjuk pelaksanaan lelang tanggal **13 Oktober 2026** dan Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang terbit di surat kabar **BANTEN POS** pada tanggal **29 September 2026**, serta berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, **PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Pangeran Polem** dengan perantaraan **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang I** melalui jasa Pra Lelang **PT. Globalindo Auction** akan melaksanakan Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap asset jaminan debitur **MUHAMMAD JUFRI** sebagai berikut:

- Sebidang tanah seluas 60 m2 berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri/tertanam diatasnya sesuai SHM No. 10999/Kuncoran terdaftar atas nama MUHAMMAD JUFRI terletak di Komplek Kuncoran Mas Permai, Jl. Jawa I, RT. 004 RW. 006, Desa/Kelurahan Kuncoran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten. **Nilai limit Rp. 203.000.000,- (seloran uang jaminan Rp. 40.600.000,-).**

Yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal	:	Senin, 16 November 2026
Waktu Penawaran	:	Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran	:	Senin, 16 November 2026 Pukul 11:00 WIB (sesuai Waktu Server)
Tempat Lelang	:	KPKNL Tangerang I Jl. Taman Makam Pahlawan (T.M.P) Taruna, Kota Tangerang
Penetapan Pemenang	:	Setelah batas akhir penawaran
Bea Lelang Pembeli	:	2 % (dua persen) dari harga terjual lelang
Pelunasan Harga Lelang	:	Paling Lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan Lelang

SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN LELANG

1. Lelang dilakukan secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Aplikasi Lelang dengan penawaran terbuka *(open bidding)* pada website **https://lelang.go.id** dengan memperhatikan menu **"Syarat dan Ketentuan"**.
2. Calon peserta lelang harus memiliki akun yang telah terverifikasi pada website tersebut dan wajib menyetorkan uang jaminan lelang (HARUS sama dengan pengumuman Lelang) sekaligus / tidak boleh di pecah-pecah) paling lambat 1 (satu) hari sebelum lelang.
3. **Pemenang lelang dikenakan PPN sebesar 1,1 %** dari harga terjual lelang dipungut langsung oleh PT. BRI (Persero) Tbk pada saat penyerahan sertifikat
4. **Pengenaan BPHTB atas perolehan tanah dan/atau bangunan mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022** tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah dimana objek lelang berada
5. Peserta lelang dapat melihat obyek yang akan dilelang sejak pengumuman lelang diterbitkan dengan kondisi **apa adanya (as is)** dan dapat menghubungi **PT. Globalindo Auction Telephone. (021) 451 7045, HP. 0813 3331 5208, 0813 1160 2279 atau www.globalindo-auction.com., atau KPKNL Tangerang I Telp (021) 55794272**

Pelaksana Lelang

KPKNL TANGERANG I

Pelaksana Pra Lelang

GLOBAL Auction

Jakarta, 09 November 2026

Ttd

PT. BRI (Persero), Tbk.

banpos channel | www.banpos.co | banten_pos | banten pos | bantenpos@gmail.com

MERAWAT BISNIS KELUARGA

Untuk menjadi besar memang harus dimulai dari hal kecil, kemudian faktor keseriusan dan yakin menjadi modal utama dalam melakukan segala sesuatu bahkan itu bisnis sekali pun. Seperti yang dilakukan oleh Moza seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) yang memulai usahanya memproduksi sapu lidi di Kampung Pesagi Serut, Desa Sindang Heula, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang. Siapa sangka usaha sapu lidinya meraup keutungan di setiap bulannya sebesar Rp8.000.000 - Rp10.000.000.

FOTO DAN TEKS DZIKI OKTOMAULIYADI



Pengrajin mengepak sapu lidi yang siap didistribusikan ke atas mobil di Kampung Pesagi Serut, Kabupaten Serang.

Siapa sangka keuntungan yang begitu besar itu diawali dengan modal hanya Rp.40.000 kemudian perlahan mulai membesar dan hingga kini penghasilannya puluhan juta. Usaha tersebut memang sudah berjalan dari tahun 1999 sampai sekarang, Moza hanya melanjutkan ketika usaha itu menjadi jalan pintas untuk tetap berpenghasilan usai ia merajut rumah tangga.

Untuk memproduksi sapu lidi tersebut, Moza mempunyai satu karyawan dan dibantu keluarganya, kemudian dalam sehari Moza berhasil memproduksi 500-1000 sapu lidi yang dikerjakan mulai dari pukul 08.00-17.00 WIB. Untuk pemasarannya sendiri yakni wilayah Jabodetabek bahkan hingga ke Lampung dengan harga Rp5000 per sapu lidi.

Sulitnya bahan baku juga menjadi penyebab turunnya omset, mengingat bukan hanya Moza, tapi satu kampung di kawasan tersebut berprofesi sebagai pengrajin sapu lidi dan membeli bahkan baku di Darah yang sama yakni wilayah Petir Kabupaten Serang dan Rangkas Kabupaten Lebak.

Meski saat ini penghasilannya jauh lebih rendah dari sebelumnya, namun Moza tidak kehilangan semangat untuk tetap memproduksi sapu lidi, karena hanya dengan usaha tersebut ia menggantungkan hidup untuk dapat membiayai dua orang anaknya yang saat ini masih Sekolah. (*)



Pengrajin membawa bambu sebagai bahan baku dari sapu lidi di Kampung Pesagi, Kabupaten Serang.



Pengrajin menyelesaikan pembuatan sapu lidi di Kampung Pesagi Serut, Kabupaten Serang



Pengrajin menyelesaikan pembuatan sapu lidi di Kampung Pesagi Serut, Kabupaten Serang



Tumpukan sapu lidi siap dijual di Kampung Pesagi Serut, Kabupaten Serang

DISKOMINFO
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang
Kab. Serang Bahagia
BerAKHLAK
#bangga melayani bangsa







Sulap Limbah Jadi Rupiah dan Dukung Swasembada Energi

Pemkab Serang Dorong BUMDes Garap Potensi Biomassa

KABUPATEN Serang resmi menjadi pusat perhatian nasional setelah dipilih sebagai lokasi launching Program Pengembangan Ekosistem Biomassa hasil kerja sama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dengan PT PLN.

Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah melihat program ini sebagai angin segar yang tidak hanya mendukung transisi energi bersih dan target net zero emission, tetapi juga menjadi mesin penggerak ekonomi baru bagi perdesaan.

"Pertama tentu saya secara pribadi dan pemerintah daerah mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya untuk Bapak Menteri Desa, Pak Dirut dari PT PLN yang telah menjadikan Kabupaten Serang sebagai tempat launching untuk program pengembangan ekosistem biomasa. Tentunya kami mendukung kegiatan ini. Karena ini penting bagi kita semua terutama bagi badan usaha milik desa," kata Bupati Serang Ratu Zakiyah.

Sebagai kepala daerah yang membawahi 326 desa, di mana 324 Desa di antaranya telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Zakiyah optimis potensi lokal di wilayahnya dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Menurutnya, limbah atau barang-barang yang selama ini dianggap sebelah mata kini bisa disulap menjadi sumber pendapatan yang bernilai ekonomis tinggi.

"Bahan-bahan untuk biomassa ini adalah barang-barang yang ada di desa. Khususnya dari bahan-bahan yang tidak terpakai yang tadinya tidak bernilai ekonomis kemudian menjadi bernilai ekonomis dan itu perlu kita manfaatkan," ujarnya.

Untuk itu, Zakiyah menginstruksikan seluruh BUMDes di Kabupaten Serang agar proaktif menggali potensi di wilayah masing-masing. Langkah ini dinilai strategis untuk mengintegrasikan kebutuhan biomassa guna mewujudkan swasembada energi sekaligus mendukung komitmen pemerintah pusat terhadap lingkungan.

"Tentu kami juga mendukung pemerintah pusat dalam rangka net zero emisi. Semoga kolaborasi ini bisa berjalan dengan baik dan lancar yang akhirnya menghasilkan pendapatan atau ekonomi asli di desa," sambungnya.

Sementara itu, Mendes PDT Yandri Susanto menjelaskan bahwa program ini merupakan wujud nyata realisasi MoU antara Kemendes dan PT PLN (Persero). Kehadiran ekosistem biomassa di desa-desa menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan 12 aksi 'Bangun Desa, Bangun Indonesia', khususnya terkait swasembada pangan, energi, dan air.

"Jadi, bahan bakunya itu banyak di desa. Contoh misalkan ada bongkul jagung, ada serbuk gergaji, ada batok kelapa dan lain sebagainya. Nah ini PT PLN merangkul bumdes yang ada di desa-desa," kata Mendes.

Ia menambahkan, revitalisasi BUMDes menjadi fokus agar lembaga ekonomi desa ini tidak sekadar berstatus badan hukum, melainkan mampu menghadirkan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Melalui kolaborasi ini, sampah dan limbah yang tadinya hanya menjadi persoalan lingkungan kini memiliki kepastian pasar dan harga dari PLN.

"Selama ini PLN kan menerima pasokan dari perusahaan-perusahaan swasta maupun BUMN, dan lain-lain. Nah, dengan hadirnya biomassa ini yang sumbernya ada di desa-desa, artinya inilah keberpihakan negara, keberpihakan pemerintah untuk memastikan ada tangan-tangan yang sampai ke desa-desa untuk menjadi sumber ekonomi," ujarnya.

"Ada barang yang tidak berharga, kalau tidak diambil PLN nggak berharga itu, serbuk gergaji, jerami, kemudian mungkin batok kelapa dan sebagainya. Itu, dibuang begitu saja. Begitu adanya kerjasama ini, ada kepastian harga. Ada kepastian yang menampung. Nah di situ artinya akan ada kegiatan ekonomi, ada yang bekerja, ada yang mendapatkan uang, ada di situ kebersihan lingkungan dan lain sebagainya," tambahnya.

Lebih lanjut, Mendes Yandri menegaskan bahwa program ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam membangun Indonesia dari bawah demi pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

"Bukan hanya sekadar uang saja tapi bagaimana keberlangsungan hidup dan kehidupan di desa itu menjadi lebih bersih, lebih guyub, lebih bagus. Karena dengan adanya penyerapan tenaga kerja baru, ada sumber ekonomi baru, itu otomatis kebahagiaan atau kesejahteraan desa akan meningkat. Artinya, program ini sudah selaras dengan program Bapak Presiden, yaitu membangun dari bawah pemerataan ekonomi sekaligus pemberantasan kemiskinan," tegasnya.

Sementara, Direktur Perencanaan Korporat dan pengembangan bisnis PT PLN, Rahmat Dewanto mengatakan bahwa PLN Group melalui anak usahanya PLN Energy Primer Indonesia mengapresiasi support Kemdes PDT terkait launching Biomassa untuk pembangkit PLN.

"Jadi ini bagian dari program PLN untuk melibatkan partisipasi dari masyarakat sekitar untuk mengolah dan mengubah yang sebelumnya limbah," tegasnya.

Tahun ini PLN berencana menganti sekitar 2,4 juta ton penggunaan bahan bakar batubara dengan biomassa. Hal ini juga disebut dapat mengurangi emisi sebesar 2,4 juta ton CO2.

"Ini merupakan bagian dari pengembangan ekonomi bagaimana bentuk kolaborasi kita dalam mendukung perekonomian sekitar," paparnya. (ADV)



